

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN, DAN
KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

(Studi pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2011-2016)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NOVITASARI
NIM. 145030401111007**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Novitasari
Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan
Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan
Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi
pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2011-2016)

Dan Dinyatakan

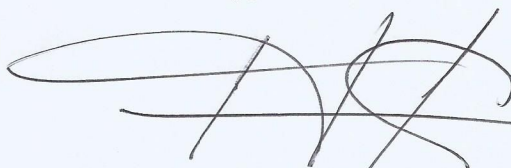
LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

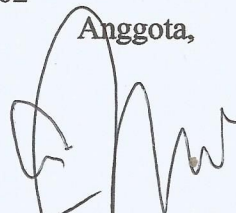

Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota,



Dr., Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,



Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak. CA
NIK. 2013048703162001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 27 Mei 2018



Novitasari

Lampiran VII : Curriculum Vitae**BIODATA DIRI**

Nama Lengkap : Novitasari
Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111007
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 September 1996
Alamat : Jalan Simpang Teluk Bayur
70 H Gg 12, Malang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : novitasariyg@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Pendidikan Formal

1. Tahun 2008 Lulus dari SDN Pandanwangi 3 Malang
2. Tahun 2011 Lulus dari SMP Negeri 14 Malang
3. Tahun 2014 Lulus dari SMA Negeri 4 Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Tahun 2016 – Staf Riset dan Publikasi Tax Center FIA UB
2. Tahun 2017 – Kepala Divisi Riset dan Publikasi Tax Center FIA UB

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Anggota Divisi Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi Acara Isi Bareng SPT PPh se-Universitas Brawijaya tahun 2016 dan tahun 2017
2. Anggota Divisi Humas Acara Tax Goes to School tahun 2016 dan tahun 2017
3. Anggota Divisi Perlengkapan Acara Diskusi Pajak tahun 2017
4. Mentor Acara Pelatihan e-SPT tahun 2017

PENGALAMAN MAGANG

Kantor Konsultan Pajak Eddy Tajib, Surabaya (17 Juli 2017 – 15 September 2017)

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan sebuah karya yang benar-benar sederhana
ini kepada kalian yang aku sayangi dan aku cintai*

Kedua orang tuaku, Bapak Husaini dan Ibu Halimah

*Kakak-kakakku dan adikku yang selalu mendukung,
mendoakan dan memberikan semangat yang tiada henti*

*Serta sahabat-sahabatku yang tulus menemaniku,
memberikan doa dan support yang luar biasa untukku*

RINGKASAN

Novitasari, 2018, **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak** (Studi pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016), Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB, 130 hal + xvii

Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pajak untuk membiayai pengeluaran negara, masih sering menemui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya, seperti adanya penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Beban pajak terutang dapat diminimalisir dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak perusahaan dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan, seperti dari internal perusahaan. Pemisahan kepemilikan perusahaan dan adanya dewan komisaris independen diindikasikan dapat meningkatkan pengawasan dari sisi internal perusahaan. Sedangkan karakteristik eksekutif dimana eksekutif memiliki sifat berani dalam mengambil risiko mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 2011-2016 yang berjumlah 7 perusahaan setiap tahun atau 42 data observasi selama enam tahun dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R²*) sebesar 0,300 yang berarti 30% penghindaran pajak dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak variabel luar penelitian yang dapat menjelaskan penghindaran pajak.

Kata kunci : cash ETR, teori agensi, good corporate governance, risiko perusahaan

SUMMARY

Novitasari, 2018, **The Influence of Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioners and Executive Characteristics toward Tax Avoidance** (Study at Property Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Year 2011-2016), Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB, 130 pages + xvii

Indonesia as a country that rely on tax to finance the state expenditure, still often encounter obstacles in the implementation of tax collection, such as tax evasion and tax avoidance. The tax expense can be minimized by tax avoidance. Corporate tax avoidance can occur due to lack of supervision, such as from internal company. The separation of company ownership and the existence of an independent board of commissioners is indicated to increase supervision from the internal side of the company. While the characteristics of executives have the courage to take risks indicates the occurrence of tax avoidance.

The purpose of this research is to determine the influence of institutional ownership, managerial ownership, independent board of commissioners and executive characteristics toward tax avoidance either partially or simultaneously. This research is included in the type of explanatory research using a quantitative approach. The sample of this research is a property companies listed on the IDX year 2011-2016 amounting to 7 companies per year or 42 observation data for six years using purposive sampling. Analysis technique used in this research is multiple linear regression.

The result of this research indicate that simultaneously institutional ownership, managerial ownership, independent board of commissioners and executive characteristics have a significant effect on tax avoidance. Partially institutional ownership, independent board of commissioners and executive characteristics have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, managerial ownership variable has no partial effect on tax avoidance. The coefficient of adjusted R^2 is 0.300, which means 30% tax avoidance influenced by the four variables, while the rest of 70% influenced by other variables not discussed in this research. These results indicate that there are still many outside research variables that can explain tax avoidance.

Keywords : cash ETR, agency theory, good corporate governance, corporate risk

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat dan petunjuknya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Eksekutif (Studi pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB, selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan sabar dan telaten telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan dorongan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh bapak ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orangtuaku Bapak Husaini dan Ibu Halimah yang tersayang serta seluruh keluarga besar, “nggunggus-nggunggusku”, yang selalu memberikan do’a dan semangat luar biasa tanpa henti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku dari lahir, Amor dan Yeni yang selalu memberikan do’a, semangat, dan selalu bersedia mendengar cerita menarik maupun keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini.
8. Sahabatku sepertetangga, Winda yang selalu memberikan canda, tawa dan hiburan, *when life gives me lemon*.
9. Sahabat-sahabatku Toni’s Daughter, Anggy, Dera, Lacha dan Upik yang selalu mendengar kisah hidupku sedari masih “remaja”, yang selalu siap sedia 24/7 ketika dibutuhkan dan selalu membimbingku menjadi dewasa.
10. Sahabat-sahabatku yang baru kutemukan di dunia perkuliahan, Amel, Meris, Motik, Skela, Yana yang selalu sabar mendengar ocehan dan keluh kesahku, yang selalu menjadi tempat tumpanganku, yang selalu ada dan selalu menghiburku dengan kerecehan kalian selama kuliah.
11. Keluarga Besar Tax Center 2016 dan 2017 yaitu Mas Rahmat, Mas Ali, Mbak Fe, Mbak Siti, Mbak April, Mbak Ifah, Mondus, Laila, Dinda, Sari, Motik, Bobby, Aje, Eldy, Christi, Dita, Nur, Kartika, Murni, Gesti, Leo,

- yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Perpajakan angkatan 2014 yang saling memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 13. Teman-teman yang selalu menanyakan kabarku, kabar skripsiku dan yang selalu memberikan semangat meskipun susah untuk bertemu.
 14. Hiburan-hiburanku, *Running Man* dan semua *variety show* yang benar-benar menghiburku disaat lelah.
 15. Seluruh sahabatku dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak-pihak yang berkenan guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Empiris	13
B. Tinjauan Teoritis	20
1. Teori Agensi	20
2. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	25
3. Kepemilikan Institusional.....	31

4. Kepemilikan Manajerial	33
5. Dewan Komisaris Independen.....	34
6. Karakteristik Eksekutif.....	36
7. Pajak	39
8. Penghindaran Pajak	41
C. Pengaruh Antar Variabel	45
D. Model Konsep dan Hipotesis.....	49
1. Model Konsep	49
2. Hipotesis	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	53
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Populasi dan Sampel.....	58
E. Metode Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	62
1. Uji Statistik Deskriptif.....	62
2. Uji Statistik Inferensial.....	63
a. Uji Asumsi Klasik.....	63
b. Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
H. Uji Hipotesis	66
1. Uji Koefisien Determinasi R^2	66
2. Uji Statistik F.....	67
3. Uji Statistik t.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
B. Penyajian Data.....	69
C. Teknik Analisis Data	78

D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	91
1. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Eksekutif secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak	92
2. Pengaruh Kepemilikan Institusional secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak	92
3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak	94
4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak	95
5. Pengaruh Karakteristik Eksekutif secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak	97
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	16
3.1	Ringkasan <i>Sampling</i> Perusahaan Properti Tahun 2011-2016.....	60
3.2	Penetapan Pemilihan Sampel per Kriteria.....	61
3.3	Pengambilan Keputusan Durbin Watson.....	65
4.1	Daftar Nama Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Sampel.....	69
4.2	Data Kepemilikan Institusional (KINS) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016.....	70
4.3	Data Kepemilikan Manajerial (KMNJ) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016.....	71
4.4	Data Dewan Komisaris Independen (DKIN) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016	73
4.5	Data Karakteristik Eksekutif (KAE) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016.....	75
4.6	Data Penghindaran Pajak (CETR) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016.....	76
4.7	Statistik Deskriptif Sampel.....	78
4.8	Hasil Uji Normalitas.....	81
4.9	Bentuk Transformasi Data.....	82
4.10	Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi.....	82
4.11	Hasil Uji Multikolonieritas.....	83
4.12	Hasil Uji Autokorelasi.....	85
4.13	Hasil Uji Runs Test.....	86
4.14	Persamaan Regresi.....	86
4.15	Koefisien Determinasi.....	88
4.16	Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	89
4.17	Hasil Uji Statistik t (Parsial).....	90
4.18	Keputusan Hipotesis.....	91

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Konsep.....	50
2.	Model Hipotesis.	51
5.	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	84



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Grafik Histogram per Variabel.....	111
2.	Pengukuran Kepemilikan Institusional.....	113
3.	Pengukuran Kepemilikan Manajerial.....	117
4.	Pengukuran Dewan Komisaris Independen.....	121
5.	Pengukuran Karakteristik Eksekutif.....	124
6.	Pengukuran Penghindaran Pajak.....	127
7.	<i>Output</i> SPSS.....	130
8.	<i>Curriculum Vitae</i>	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi setiap negara, pajak merupakan unsur penting dalam rangka membiayai segala bentuk pengeluaran negara. Pajak menjadi harapan pemerintah untuk dapat menopang anggaran penerimaan negara. Berdasarkan data sekunder tahun 2016 ditemukan rata-rata kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN adalah 77,6% (kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, sektor pajak menjadi perhatian pemerintah di negara-negara di dunia. Namun pelaksanaan pemungutan pajak ini sering menemui hambatan, seperti adanya penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Kedua hal tersebut merupakan praktik untuk meminimalisir beban pajak terutang.

Beban pajak terutang secara praktik dapat diminimalisir dengan cara yang legal ataupun ilegal. Penghindaran pajak merupakan tindakan legal atau boleh dilakukan oleh Wajib Pajak, meskipun bukan selera pemerintah karena menghambat penerimaan pajak Indonesia. Sedangkan penggelapan pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya dan tindakan tersebut jelas melanggar hukum (Sari, 2013) dalam Mahulae et. al (2016). Kedua praktik ini sama-sama bertujuan untuk meminimalisir pajak terutang, hanya saja cara yang digunakan berbeda.

Penghindaran dan penggelapan pajak merupakan persoalan yang rumit. Di satu sisi perusahaan menginginkan pajak yang dibayar berkurang, namun di sisi lain baik penghindaran dan penggelapan pajak sama-sama menimbulkan

kerugian bagi negara. Berikut merupakan data persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2016:

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21 T	1.072,37 T	1.294,26 T	1.355,20 T
Realisasi	921,27 T	981,83 T	1.060,83 T	1.105,81 T
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 (2017)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target pajak pada tahun 2016 mencapai Rp1.355,20 T sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.105,81 T yang berarti capaian Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2016 sebesar 81,60%. Capaian tersebut turun dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia marak terjadi praktik-praktik yang menimbulkan penerimaan pajak menjadi berkurang baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal.

Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006 juga menerbitkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia yang didalamnya memuat Asas GCG, Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku, Organ Perusahaan, Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Pedoman Praktis Penerapan GCG dan lain-

lain. Pedoman ini dikeluarkan bagi perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan GCG. Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional.

Good Corporate Governance sebagai rangkaian kebijakan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*) disinyalir mampu mengontrol perusahaan agar bertindak sesuai aturan. Lukviarman (2006) menyimpulkan bahwa implementasi GCG harus menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas tersebut adalah Transparansi; Akuntabilitas; Responsibilitas; Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan, yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

Kehadiran GCG yang baik bagi perusahaan akan menunjang aktivitas operasional. Mekanisme pelaksanaan GCG ini juga harus dijadikan perhatian utama dalam perusahaan agar penerapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Seperti tujuan GCG yaitu untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pihak (Tjager et. al. 2003 dalam Wibawa et. al, 2016). Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan posisi daya saing perusahaan,

meningkatkan kinerja perusahaan, mengelola risiko dan efisiensi perusahaan (Mahulae et. al, 2016).

Salah satu struktur GCG yaitu komposisi pemegang saham, yang dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemegang saham oleh manajemen (kepemilikan manajerial) dan pemegang saham oleh institusi (kepemilikan institusional). Kedua kepemilikan tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan perusahaan yang terpisah akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Perbedaan kepentingan tersebut dapat berupa manajer yang menginginkan laba perusahaan tinggi sehingga manajer menurunkan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak. Perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pemegang saham yang cenderung menginginkan perusahaannya aman meskipun laba yang diperoleh rendah.

Kepemilikan saham yang pertama yaitu kepemilikan institusional yang mana sahamnya dimiliki oleh institusi. Saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lainnya akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme pengawasan tersebut akan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

Kepemilikan institusional yang tinggi akan membuat upaya pengawasan menjadi lebih insentif sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik manajer. Selain itu adanya hak suara yang dimiliki dalam perusahaan membuat pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk berfokus pada

kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Keberadaan pemilik institusional dalam mekanisme tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak (Shliefer dan Vishney, 1986).

Selain kepemilikan institusional, terdapat pula kepemilikan manajerial yang mana proporsi sahamnya dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Aktivitas manajer yang memiliki saham perusahaan akan berbeda dengan manajer yang tidak memiliki saham perusahaan. Manajer yang memiliki saham akan mempunyai peran ganda yaitu sebagai manajer serta pemegang saham yang menyebabkan manajer memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan para pemegang saham lainnya. Sebaliknya, manajer yang tidak memiliki saham kemungkinan memiliki kepentingan yang tidak sejalan dengan para pemegang saham.

Semakin besar saham dimiliki oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial akan memberikan motivasi bagi manajer agar terus meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Sihaloho dan Pratomo, 2015). Manajer yang juga sebagai pemegang saham tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan karena hal tersebut akan merugikannya. Kerugian yang terjadi dapat berupa kehilangan dana yang diinvestasikannya maupun insentif dari pekerjaannya sebagai manajer.

Pengawasan yang merupakan bagian penting dalam GCG diwujudkan dalam pembentukan dewan komisaris perusahaan. Dewan komisaris memegang peranan penting bagi perusahaan yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam menerapkan GCG. Secara tidak langsung, adanya dewan komisaris ini akan mengawasi kinerja pengelola perusahaan termasuk dalam hal kewajiban perpajakan perusahaan.

Pemerintah dalam rangka pelaksanaan GCG juga mewajibkan perusahaan untuk mempunyai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dewan komisaris independen dari jajaran anggota dewan komisaris (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta, 2004). Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Hal tersebut penting untuk menjaga independensi perusahaan di mata publik. Adanya dewan komisaris independen ini dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik sehingga laporan keuangan menjadi lebih objektif.

Penghindaran pajak yang dilakukan dalam perusahaan tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh eksekutif perusahaan. Eksekutif sebagai pengambil keputusan perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan (Feranika, 2016). Individu yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan mengenai pajak adalah divisi akuntansi dan pajak serta konsultan pajak perusahaan. Namun,

eksekutif selaku pimpinan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan termasuk keputusan penghindaran pajak.

Low (2006) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya, eksekutif memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis sehingga cenderung mengambil risiko dengan melakukan penghindaran pajak lebih sering. Berkebalikan dengan *risk averse* yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam keputusan bisnis. Karakteristik tiap eksekutif tentu berbeda antara satu sama lain, dengan berbagai faktor yang dapat membentuk karakteristik eksekutif. Perbedaan tersebut menyebabkan karakteristik dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif.

Hasil dari penelitian terdahulu, Rahmawati et al (2016) serta Sihaloho dan Pratomo (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Rahmawati et al (2016) dan Wibowo et al (2016) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian Sihaloho dan Pratomo (2015), Feranika (2016) serta Budiman dan

Setiyono (2012) menemukan bahwa karakteristik eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan jasa sektor properti dalam penelitian ini dijadikan sebagai objek penelitian karena sektor properti memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Saat ini sektor tersebut sedang menjadi target sasaran pengawasan ketat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengamat perpajakan dari Tax Center Universitas Indonesia, Danny Septriadi menyatakan bahwa potensi perpajakan dari sektor properti relatif besar dan belum tergarap maksimal (nasional.republika.co.id). Di tahun 2013 terdapat pemeriksaan secara serentak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak kepada perusahaan properti akibat adanya potensi kehilangan (*potential loss*) penerimaan pajak yang cukup besar.

Setelah pemeriksaan tersebut dilakukan, di tahun 2016 ditemukan bahwa kontribusi 100 Wajib Pajak (WP) Besar properti menurun paling drastis. Penerimaannya turun 41% menjadi hanya Rp 6,52 triliun pada tahun 2016 dari yang awalnya mencapai Rp 11,03 triliun pada 2015. Penurunan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah Wajib Pajak di sektor properti yang justru mengalami kenaikan. DJP mencatat Wajib Pajak di sektor ini mencapai 13.602 pada tahun lalu atau naik 28,65% dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 3.016 (katadata.co.id). Beberapa penjelasan di atas menyimpulkan bahwa potensi penghindaran pajak di sektor tersebut tinggi dan layak untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak** (Studi pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2016)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
4. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak
5. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan memberikan manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian ini. Kegunaan atau manfaat atas hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis.

1. Kontribusi Akademis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan serta menambah referensi pengetahuan mengenai aktivitas penghindaran pajak dengan memahami faktor-faktor yang

memengaruhinya. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembanding maupun bahan pengembang penelitian selanjutnya terkait pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif terhadap tindakan penghindaran pajak.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi fiskus dalam meningkatkan efektivitas dari kebijakan dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak di perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam mempertimbangkan kebijakan pajak di masa depan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang maraknya penghindaran pajak di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Kemudian dibahas mengenai tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penelitian terdahulu dan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian seperti penjelasan mengenai

masing-masing indikator yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran yang berguna untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta menguraikan pula mengenai hipotesis penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data diperoleh, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran sampel penelitian dan analisis terhadap pengolahan data yang akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian apakah sesuai dengan hipotesis awal atau tidak, serta memberikan penjelasan mengenai hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian beserta saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam suatu penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk menunjang penelitian itu sendiri dan memperkuat kerangka pikir peneliti. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Budiman dan Setiyono (2012)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 perusahaan *Non-banking, Credit Agencies Other Than Bank, Securities, Insurance* dan Investasi yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010. Sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Sihaloho dan Pratomo (2015)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*”. Sampel yang digunakan berjumlah 17 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian

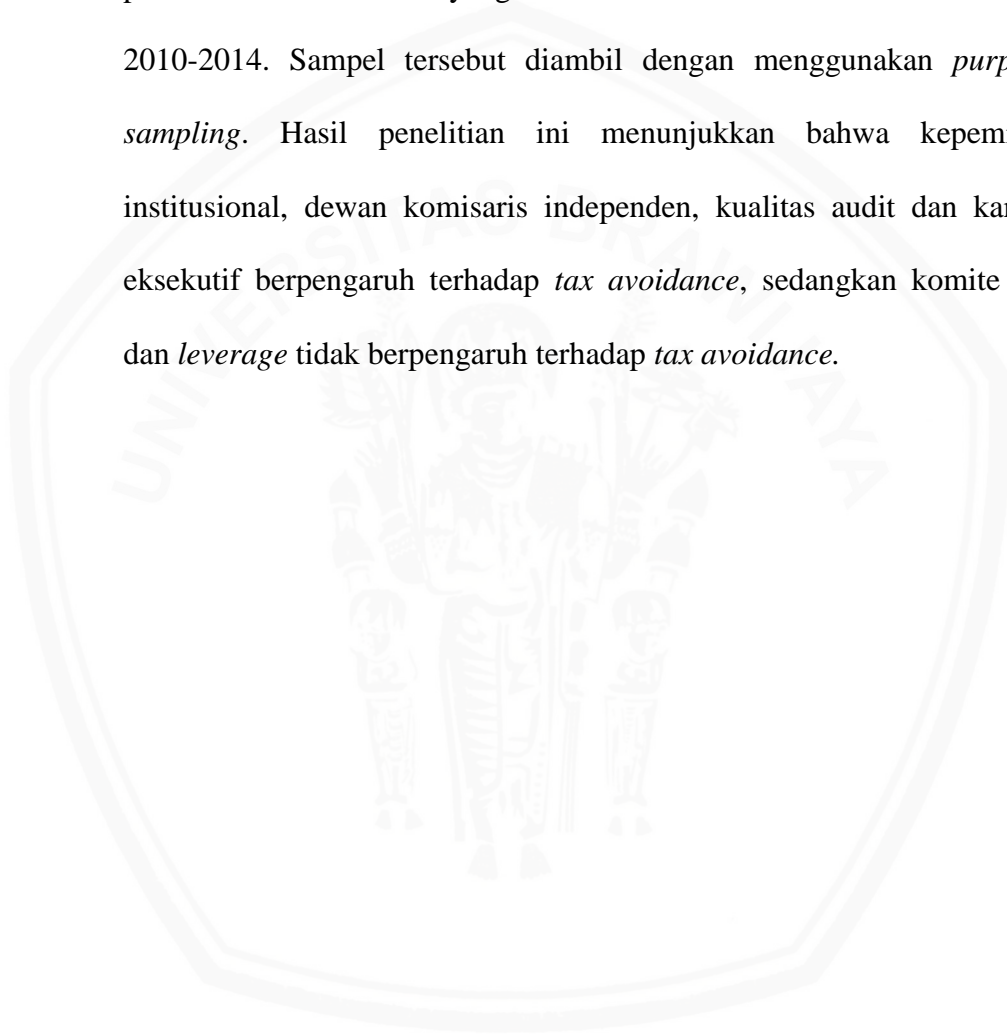
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen sebagai proksi dari *corporate governance* dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Rahmawati et al (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*”. Sampel penelitian ini berjumlah 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *puroposive sampling*. *Corporate Governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal dan komite audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sementara komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan dan kualitas auditor eksternal memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Feranika (2016)

Penelitian berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. Sampel yang digunakan yaitu 43 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Sampel tersebut diambil dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Budiman dan Setiyono (2012)	Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	<u>Variabel Independen:</u> Karakter Eksekutif <u>Variabel dependen:</u> <u>Penghindaran Pajak</u>	Eksekutif yang memiliki karakter <i>risk taker</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).	Variabel yang digunakan yaitu Karakter Eksekutif dan Penghindaran Pajak	Studi penelitian pada perusahaan <i>Non-banking, Credit Agencies Other Than Bank, Securities, Insurance</i> dan Investasi yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010
2.	Sihaloho dan Dudi (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Eksekutif terhadap <i>Tax</i>	<u>Variabel Independen:</u> kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen sebagai proksi dari	Variabel yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris	Studi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013

		<i>Avoidance</i>	independen, karakteristik eksekutif <u>Variabel</u> <u>dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i>	<i>corporate</i> <i>governance</i> dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	independen, karakteristik eksekutif dan <i>Tax Avoidance</i>	
3.	Rahmawati et al (2016)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate</i> <i>Sosial</i> <i>Responsibility</i> dan <i>Corporate</i>	<u>Variabel</u> <u>Independen:</u> <i>Corporate</i> <i>Sosial</i> <i>Responsibility</i> , Proporsi Komisaris	CSR dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan	Variabel yang digunakan yaitu Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial,	Variabel yang digunakan yaitu <i>Corporate Sosial</i> <i>Responsibility</i> , Kualitas Auditor Eksternal, Komite Audit Studi penelitian pada

		<i>Governance terhadap Tax Avoidance</i>	<p>Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Auditor Eksternal, Komite Audit.</p> <p><u>Variabel dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>institusional memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sementara komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan dan kualitas auditor eksternal memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>	<p>Kepemilikan Institusional dan <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2012-2014.</p>
4.	Feranika (2016)	Pengaruh Kepemilikan	<p><u>Variabel Independen:</u></p>	<p>Kepemilikan institusional,</p>	<p>Variabel yang digunakan yaitu</p>	<p>Variabel yang digunakan yaitu Kualitas Audit,</p>

		Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, <i>Leverage</i> <u>Variabel dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i>	dewan komisaris independen, kualitas audit dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan <i>Tax Avoidance</i>	Komite Audit, <i>Leverage</i> Studi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014
--	--	--	--	--	--	---

Sumber: Diolah peneliti (2017)

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Agensi

a. Pengertian Teori Agensi

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Teori Agensi yang juga disebut *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Sutedi, 2012:13). Teori agensi ini dilandasi oleh asumsi yang menyatakan bahwa setiap individu berusaha untuk memaksimalkan fungsi yang dimilikinya (Djanegara, 2008:13).

Pemisahan pengelolaan dengan kepemilikan perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin akibat dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Tenaga profesional atau *agents*-nya pemegang saham tersebut memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sementara pemilik perusahaan atau *principal* bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen, dan memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Adanya pemisahan pengelolaan antara pemilik perusahaan dengan manajemen (tenaga profesional) memiliki dampak positif seperti pengelolaan perusahaan yang lebih optimal akibat dikelola oleh

profesional yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha. Namun pemisahan pengelolaan ini juga memiliki dampak negatif seperti keleluasaan manajemen dalam memaksimalkan laba perusahaan yang mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Selain itu pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan (Sutedi, 2012).

b. Asumsi Teori Agensi

Asumsi yang digunakan dalam teori ini menurut Sutedi (2012: 16) adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam mengambil keputusan, individu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Maka dari itu *agents* yang mendapat kewenangan dari *principal* akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingannya sendiri.
- 2) Individu mempunyai jalan pikiran yang rasional, sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias atas suatu dampak dari masalah agensi serta nilai harapan keuntungannya di masa depan. Oleh karena itu, dampak dari perilaku menyimpang dari kepentingan pihak lainnya yang terkait langsung, dapat dimasukkan ke dalam perhitungan pihak lainnya dalam memasok kebutuhan.

Tindakan *agents* yang dianggap tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* dapat memicu terjadinya biaya agensi.

Menurut Sutedi (2012:17), biaya agensi yang timbul dari konflik kepentingan antara *agents* dan *principal* berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi berikut ini:

- 1) Biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *agent*.
- 2) Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama dengan jika pilihan tersebut dilakukan oleh pemegang saham karena risiko meruginya tinggi.
- 3) Biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan monitoring kinerja dan perilaku *agents* oleh *principal* (*monitoring cost*).
- 4) Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan *agents* oleh *principal* (*bonding cost*).

c. Pokok-pokok Keterbatasan Teori Agensi

Menurut Sutedi (2012:21), teori agensi tidak terlepas dari kelemahan asumptif karena unsur penyederhanaan atau generalisasi yaitu:

1) Pemegang saham

Pemegang saham dianggap mempunyai kesatuan kepentingan untuk menahan sahamnya dalam jangka waktu yang tidak tertentu serta berperilaku seragam. Sedangkan pada kenyataannya perilaku pemegang saham berbeda-beda. Pemegang saham dalam jumlah kecil tidak terpengaruh oleh perilaku menyimpang pengelola yang mementingkan dirinya sendiri asalkan penurunan harga sahamnya masih dalam batas-batas toleransinya.

2) Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman diasumsikan individu yang rasional dan mempunyai motif bekerja berdasarkan kaidah *normative* bisnis sekalipun penentu pemberian pinjaman (bank) juga terkait dengan hubungan agensi di perusahaan tempatnya bekerja.

3) *Market for Corporate Control*

Market for Corporate Control diasumsikan mengancam setiap saat dengan frekuensi tinggi, tanpa hambatan sehingga mampu membuat pengelola takut berperilaku menyimpang dari keinginan pemegang saham.

4) Informasi

Informasi secara implicit diasumsikan simetrik, sehingga kinerja buruk pengelola berdampak pada nasibnya di masa mendatang dan pengelola secara jujur melaporkan kinerja keuangan perusahaan.

5) Pasar Tenaga Kerja

Pasar ini diasumsikan bekerja sempurna sehingga apabila kinerja manajemen menyimpang dari keinginan pemegang saham maka pengelola tersebut tidak akan digunakan lagi oleh pasar.

6) Pasar Modal

Pasar modal diasumsikan bekerja efisien sehingga harga saham perusahaan mencerminkan kinerja manajemennya. Pasar modal pada kenyataannya tidak *efficient strong form*, di beberapa negara ada yang semi *strong form* dan *weak form*.

7) Subordinat

Dalam teori ini, diasumsikan subordinat dan pimpinan merupakan satu tim professional yang kompak dan homogen. Dalam kenyataannya belum tentu karena berbagai sebab, diantaranya adalah terdapat *misallocation* dan motif preferensi pimpinan dalam memilih anak buah.

8) Mekanisme Pengendali Perilaku *Negatif Agent*

Dalam teori ini tersirat adanya kebutuhan mekanisme yang diasumsikan bisa bekerja menjadi pengendali perilaku menyimpang pengelola dari keinginan pemegang saham (*bounding activities; monitoring activities; market for corporate control; capital market; tuntutan subordinat atas kinerja pimpinannya dan managerial labor market*).

9) Balas Jasa

Dalam teori ini, gaji pengelola dan subordinatnya diasumsikan belum menjamin memuaskan namun masih ingin menambah penghasilannya dan hidup lebih nyaman lagi dalam bekerja. Dalam kenyataannya pengelola tidak seragam batas kepuasannya.

10) Penggantian Pengelola

Penggantian pengelola diasumsikan mudah karena terdapat transparansi kinerja. Dalam kenyataannya kinerja yang di bawah standar bisa terlihat baik dan penggantian pengelola bisa tidak mudah karena masalah kelangkaan tenaga berpengalaman.

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance menurut *World Bank*, adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2016:2). *Corporate Governance* juga diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sutedi, 2011) dalam Mahulae et. al (2016). Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan GCG adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan yang dapat mengontrol perusahaan sehingga tercipta nilai tambah bagi perusahaan.

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006:68) penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

- 1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
- 2) Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah
- 3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan

- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan
- 5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

GCG mulai mendapat perhatian khusus di Indonesia setelah Indonesia dilanda krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Banyak pihak berpendapat bahwa krisis ekonomi di Asia Timur itu disebabkan oleh kegagalan sistematis penerapan GCG yang berasal dari sistem kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan standar *auditing* yang tidak konsisten, praktik perbankan yang buruk, pengawasan *board of directors* yang tidak efektif serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham minoritas. Dalam kajiannya, Bank Pembangunan Asia menarik kesimpulan bahwa krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN adalah akibat dari sistem GCG yang buruk dalam perekonomian (Sutedi, 2012:66).

b. Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012:41) terdapat unsur-unsur GCG yang dapat menjamin berfungsinya GCG, yaitu:

1) *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan yaitu:

- a) Pemegang saham
- b) Direksi
- c) Dewan komisaris
- d) Manajer
- e) Karyawan/serikat pekerja

- f) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja
- g) Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan antara lain yaitu keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, *accountability*, *fairness*, dan aturan dari *code of conduct*

2) *Corporate governance – external* perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan yaitu:

- a) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
- b) Investor
- c) Institusi penyedia informasi
- d) Akuntan publik
- e) Institusi yang memihak kepentingan public bukan golongan
- f) Pemberi pinjaman
- g) Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan meliputi aturan dari *code of conduct*, *accountability*, *fairness* serta jaminan hukum. Perilaku partisipasi pelaku GCG yang berada dalam rangkaian unsur-unsur tersebut baik internal dan eksternal menentukan kualitas GCG.

c. *Asas Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas-asas tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan

dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas tersebut menurut Sutedi (2012) yaitu:

1) Transparansi

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut masalah keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan. Perusahaan harus mampu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya dan hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Akuntabilitas

Perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *stakeholders* lain karena perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. Agar prinsip ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen. Dewan komisaris harus dapat

melaksanakan pertimbangan yang objektif tentang urusan perusahaan (khususnya terhadap manajemen) secara independen.

Perusahaan menetapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas antar organ perusahaan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan.

3) Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.. Kemandirian merupakan suatu keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak lain yang dapat mencampuri urusan perusahaan.

5) Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kesetaraan berarti bahwa terdapat perlakuan yang sama

terhadap semua pemegang saham baik investor asing maupun pemegang saham minoritas.

d. Wilayah Permasalahan Penerapan GCG yang Berkaitan dengan Pemegang Saham

1) Masalah GCG

Dipisahkannya kepemilikan dari pengelolaan perusahaan menimbulkan masalah GCG. Apabila manajer yang digaji dipisahkan dari pemegang saham yang terpecar, maka akan timbul kemungkinan bahwa perusahaan dikelola tidak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham

2) Struktur Kepemilikan yang Beraneka Ragam

Kepemilikan bisa terkonsentrasi ataupun tersebar antara banyak pemilik. Tingkat konsentrasi dan komposisi kepemilikan menentukan distribusi kekuasaan perusahaan antara manajer dan pemegang saham, yang pada dirinya akan memengaruhi sifat pengambilan keputusan yang berpengaruh pada perkembangan perusahaan.

3) Pengawasan dari Pemegang Saham

Jika manajemen terpisah dengan pemilik, maka akan timbul permasalahan tentang bagaimana pemegang saham dapat secara selektif memonitor pengurusan perusahaan, sehingga pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Untuk itu dibentuklah lembaga komisaris, partisipasi pemegang saham melalui RUPS, peran menentukan kompensasi Direktur yang dikaitkan dengan kinerja,

perlindungan hukum, transparansi dan kewajiban *disclosure* termasuk mengenai hak pemegang saham minoritas.

e. Pengukuran *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Komisaris Independen. Alasan penggunaan pengukuran tersebut dikarenakan pada penelitian-penelitian sebelumnya variabel-variabel tersebut masih terdapat *gap* penelitian atau masih terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Perbedaan hasil penelitian terdahulu akan dijelaskan pada pembahasan mengenai pengaruh antar variabel.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti pemerintah, perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, perusahaan berbentuk perseroan (PT.), perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan ini umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya et. al, 2012) dalam Sihaloho dan Pratomo (2015). Ahmad dan Septriani (2008) berpendapat bahwa masalah keagenan dapat dikurangi apabila kepemilikan institusional meningkat.

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan *blockholder* atau kepemilikan individu atau atas nama perseorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan

kepemilikan *insider* atau manajerial. Kelebihan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional menurut Sandy dan Lukviarman (2015) antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Investor memiliki kemampuan untuk mengurangi peluang perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri. Manajer perusahaan menyebabkan masalah keagenan akibat adanya kekuasaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer yang menyimpang yang dapat mengurangi keuntungan dari pemegang saham (Murni et. al, 2016). Shliefer dan Vishney (1986) juga berpendapat bahwa dengan adanya hak suara yang dimiliki dalam perusahaan, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham membuat pemilik institusional memilih untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Sehingga dengan adanya kepemilikan institusional ini, akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Biasanya *institutional investors* seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang bertujuan memaksimalkan investasi mereka, akan berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan GCG (Sutedi, 2012:37).

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan (Mahulae et al., 2016). Dapat pula diartikan sebagai situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dapat disebut pemegang saham perusahaan. Adanya kondisi tersebut membuat konflik kepentingan yang biasa terjadi dalam *agency theory* tidak ada. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham.

Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer akan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer pula lah yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen, 1986). Adanya kepemilikan manajerial juga akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadinya (Sihaloho dan Pratomo, 2015).

Manajer disini diperlakukan bukan sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi juga diperlakukan sebagai pemegang saham. Sehingga manajer termotivasi dan kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Dampak akhirnya yaitu nilai perusahaan meningkat dan

manajer dapat menikmati sebagian keuntungan yang menjadi bagiannya tersebut.

5. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham kendali. Seorang komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang terkait (Pohan, 2009). Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Bagian III 1.6, dijelaskan lebih lanjut mengenai direktur tidak terafiliasi, yaitu:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi,
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi lainnya dari perusahaan tercatat,
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain,
- d. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur.

Dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan kinerja perusahaan. Dewan Komisaris dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bertugas untuk memberikan nasehat dan mengawasi direksi.

Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Saat ini, hampir semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah memiliki direktur independen dan komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaannya. Hal ini dikarenakan BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.

Kehadiran komisaris independen pada dewan komisaris dapat memberikan manfaat dalam menjaga independensi perusahaan melalui pengawasan dan pemberian nasihat sampai dengan tindakan pencegahan, perbaikan, pemberhentian sementara dengan mekanisme perusahaan. Tugas-tugas utama komisaris independen bersama dewan komisaris dalam Surya dan Yustiavandana (2006:138) yaitu:

1. Tugas yang terkait dengan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*), yaitu:
 - a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha;
 - b. Menetapkan sasaran kerja;
 - c. Mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan;
 - d. Memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset
2. Tugas yang terkait dengan transparansi (*transparency*) dan keadilan (*fairness*), yaitu menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi

kunci dan penggajian anggota dewan direksi serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.

3. Tugas yang terkait dengan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*) yaitu memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Tugas yang terkait dengan transparansi dan pertanggungjawaban mengenai monitor pelaksanaan *governance* dan pengadaan perubahan yang perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (*OECD Principles of Corporate Governance*). Proses keterbukaan ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

Seperti yang kita ketahui, sistem pemungutan pajak *self assesment* dapat menimbulkan tindakan-tindakan penghindaran pajak. Apabila pihak manajemen maupun pemilik perusahaan menginginkan untuk melakukan penghindaran pajak, maka hal tersebut bisa terjadi. Sebab itu merupakan hak mereka atas perusahaan. Namun, untuk memenuhi kepentingan semua pihak, hal tersebut perlu dihindari dan dicegah yaitu dengan adanya komisaris independen.

6. Karakteristik Eksekutif

Pimpinan perusahaan atau eksekutif (misal CEO, CFO dan *Top Executive*) merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sistem kepemimpinan di suatu perusahaan atau suatu organisasi. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, eksekutif merupakan pejabat tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada direktur utama atau pemimpin tertinggi dalam perusahaan atau organisasi. Eksekutif tersebut merupakan individu pengambil kebijakan perusahaan yang dalam menjalankan tugasnya tersebut, eksekutif memiliki karakter yang berbeda-beda, yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*.

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* yaitu eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam keputusan bisnis (Maccrimon dan Wehrung, 1990) dalam Budiman dan Setiyono (2012). Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih risiko yang lebih rendah (Low, 2006).

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu dalam melakukan pembiayaan dari hutang (Lewellen, 2003) dalam Budiman dan Setiyono (2012). Hal tersebut dilakukan agar perusahaan tumbuh lebih cepat. Berbeda halnya dengan *risk averse*, biasanya eksekutif *risk averse* berusia lebih tua, sudah lama memegang jabatan dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan. Selain itu, eksekutif *risk averse* lebih menitikberatkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar (Budiman dan Setiyono, 2012).

Jenis karakteristik eksekutif yang berada dalam manajemen perusahaan apakah merupakan *risk taking* atau *risk averse* dapat dilihat dari besar-kecilnya risiko perusahaan yang ada. Tingkat risiko yang besar akan mengindikasikan

bahwa pimpinan perusahaan atau eksekutif bersifat *risk taker*. Sebaliknya, tingkat risiko yang kecil mengindikasikan eksekutif bersifat *risk averse* yang cenderung menghindari risiko (Feranika, 2016).

a. Risiko Perusahaan

Keputusan melakukan investasi tidak bisa dipisahkan dari risiko yang harus dipikul atau ditanggung. Ketika perusahaan akan memulai suatu investasi dalam suatu proyek, eksekutif harus memperhitungkan penghasilan setelah pajak atas investasi yang dilakukannya. Penghasilan maupun kerugian berhubungan dengan risiko yang dihadapi. Salah satu contoh risiko yaitu misalnya pengenaan pajak yang tiba-tiba akibat adanya berbagai koreksi yang dilakukan pada saat pemeriksaan. Beberapa risiko yang mungkin terjadi karena investasi menurut Suandy (2016:4) yaitu:

1. Risiko penghasilan, timbul karena adanya ketidakpastian penerimaan operasi dari biaya saat ini, ketidakpastian atas harga keluaran perusahaan dibandingkan dengan biaya pada saat masa yang akan datang.
2. Risiko modal, timbul karena ketidakpastian ekonomi atas biaya depresiasi sebab aset yang cepat usang atau bergantian mode sehingga aset yang diinvestasi sudah ketinggalan zaman dan tidak mampu bersaing lagi.
3. Risiko keuangan, timbul karena ketidakpastian tingkat biaya bunga atas dana pinjaman sehingga perusahaan kemungkinan tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunganya.

4. Risiko inflasi, timbul karena ketidakpastian tingkat inflasi pada masa yang akan datang sehingga berpengaruh terhadap penghasilan dan biaya penggantian aset di masa mendatang.
5. Risiko atas keputusan yang tidak dapat diubah, timbul karena pembelian aset atau biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.
6. Risiko politik, timbul karena adanya perubahan atas kebijakan pemerintah misal dalam bidang perpajakan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara maupun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Pajak

a. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

1. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014) :

“Pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

2. Menurut Feldmann dalam Resmi (2014), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi; dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

3. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

4. Menurut Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa unsur penting dari definisi pajak yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara dan dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah
2. Dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Bersifat memaksa, terdapat sanksi berupa denda, bunga maupun pidana apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku
4. Tanpa jasa timbal balik dari Negara secara langsung
5. Digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang nantinya bermanfaat bagi kesejahteraan umum

b. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

1. *Official Assessment System*

Aparatur perpajakan menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, menyetorkan serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, jujur, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Adanya sistem ini yang memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak membuat praktik-praktik penghindaran pajak, penggelapan pajak dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan kerugian bagi negara semakin bertambah.

3. *Withholding System*

Pihak ketiga yang ditunjuk memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

8. Penghindaran Pajak

Dalam rangka meminimumkan kewajiban pajak, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan, baik yang masih memenuhi ketentuan peraturan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak menurut Suandy (2016:8) adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Darussalam dan Danny dalam www.ortax.co.id juga menyimpulkan apabila istilah *tax avoidance* diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara.

Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*).
Istilah lain yang digunakan adalah (*defensive tax planning*).
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang digunakan adalah *aggressive tax planning*.

Antara satu negara dengan negara lainnya dapat memiliki perbedaan pandangan dalam mengkategorikan penghindaran pajak yang diperkenankan maupun yang tidak diperkenankan. Salah satu skema penghindaran yang dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan

(*unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax planning*) di Australia oleh *Australian Taxation Office (ATO)* adalah sebagai berikut:

1. Transaksi yang buat semata-mata untuk tujuan menghindari pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis.
2. Berusaha untuk mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya tidak ditujukan kepadanya.
3. Membuat transaksi yang berputar-putar yang akhirnya transaksi tersebut akan kembali lagi kepadanya.
4. Penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar di masa yang akan datang.
5. Memanfaatkan suatu entitas usaha dimana penghasilan yang diterima oleh entitas usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.
6. Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country*.

Indonesia sendiri belum mempunyai definisi yang jelas mengenai *tax planning*, *acceptable tax avoidance*, *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax planning* dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Maka dari itu, dalam praktiknya sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Terdapat 3 karakter penghindaran pajak yang disebutkan oleh Komite Urusan Fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial yang peraturannya seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan yang sebenarnya tujuan tersebut tidak dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

b. Pengukuran Penghindaran Pajak

Review penelitian pajak yang ditulis oleh Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat 12 variasi pengukuran penghindaran pajak. Variasi tersebut terbagi menjadi lima pengukuran *ETR (Effective Tax Rate)*, empat pengukuran *BTD (Book Tax Difference)*, *unrecognized tax benefit*, *tax shelter activity* dan *marginal tax rate*. Variasi-variasi pengukuran penghindaran pajak tersebut telah digunakan peneliti terdahulu untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Perhitungan penghindaran pajak dengan *cash ETR* merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dyreng, et al. (2005). Penggunaan pengukuran *BTD* merujuk pada penelitian yang dibuat oleh Desai dan Dharmapala (2006). Sedangkan pengukuran *marginal tax rate* merujuk pada penelitian yang dibuat

oleh Shevlin (1990), Graham dan Kim (2009) dan Blouin et al. (1990). Keseluruhan pengukuran penghindaran pajak tersebut dirangkum dalam *review* penelitian pajak yang dilakukan oleh Hanlon dan Heitzman yang berjudul “*A review of tax research*”.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Cash ETR* (CETR). CETR merupakan rasio kas pembayaran pajak atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Dyreng et. al (2005) menyatakan bahwa CETR baik untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. CETR juga menggambarkan aktivitas pembayaran pajak perusahaan karena CETR dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

C. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh instansi atau perusahaan lain maupun pemerintah menyebabkan pengawasan terhadap kinerja manajemen meningkat. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong manajemen untuk bertindak dengan kehati-hatian sehingga perilaku manajemen yang mementingkan kepentingan pribadi menjadi berkurang. Praktik penghindaran pajak yang memiliki risiko besar cenderung dihindari. Pemilik mayoritas membuat manajer yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan strategi operasi dari perusahaan namun harus merubahnya menjadi pemegang jabatan yang menghasilkan kenaikan laba

yang maksimal. Adanya hak suara yang dimiliki dalam perusahaan, juga mampu membuat pemilik mayoritas memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan institusional diharapkan tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah.

Hasil penelitian terdahulu Sihalo dan Pratomo (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak artinya semakin besar kepemilikan institusional akan membuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dihindari. Rahmawati et al (2016) juga menyebutkan bahwa adanya proporsi kepemilikan saham oleh institusi yang lebih tinggi akan semakin mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan memonitor setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Berbeda halnya dengan Sandy dan Lukviarman (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Perusahaan yang sahamnya sebagian dimiliki oleh manajer menyebabkan timbulnya motivasi kepada manajer untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal tersebut dilakukan karena manajer akan ikut merasakan baik manfaat maupun risiko dari keputusan yang dibuatnya, sehingga manajer cenderung berhati-hati dan memilih tindakan yang lebih kecil risikonya. Seperti

penghindaran pajak, manajer harus memilah tindakan penghindaran pajak berdasarkan besar kecilnya risiko yang akan dihadapi dan memutuskan apakah tindakan tersebut tetap dilakukan atau tidak.

Semakin besar proporsi saham yang dimiliki manajer maka akan membuatnya melakukan keputusan-keputusan operasional yang akan memaksimalkan kegunaannya. Keputusan tersebut tidak hanya menyangkut keuntungan mengenai keuangan namun juga keuntungan non-keuangan dari aktivitas perusahaannya. Seperti kehadiran di kantor, level kedisiplinan karyawan, hubungan personal dengan karyawan dan sebagainya yang menunjukkan bahwa manajer akan berupaya lebih giat dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan manajerial diharapkan tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah. Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *cash ETR* yaitu Musyaroffah (2017) dan Sihalo dan Pratomo (2015). Sedangkan penelitian Mahulae et al (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Komisaris independen memiliki peran penting yaitu untuk mengawasi kinerja perusahaan. Adanya komisaris independen akan memberikan manfaat dalam menjaga independensi perusahaan melalui pengawasan dan pemberian nasihat sampai dengan tindakan pencegahan, perbaikan, serta pemberhentian sementara dengan mekanisme perusahaan. Apabila tidak ada pengawasan dari

komisaris independen maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka. Penghindaran pajak juga akan lebih mudah dilakukan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, diharapkan tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah. Hasil penelitian terdahulu Sandy dan Lukviarman (2015) dan Feranika (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Murni et. al (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak

Eksekutif dalam menjalankan tugasnya memiliki dua sifat, yaitu *risk taker* yang dikenal lebih berani dalam mengambil risiko dan *risk averse* yang cenderung kurang berani dalam mengambil risiko. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* dan tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse*. Kedua sifat tersebut mempengaruhi sikap eksekutif dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan perpajakan. Apabila eksekutif bersifat *risk taker* maka eksekutif akan cenderung mengambil risiko dengan melakukan penghindaran pajak melalui misalnya pembiayaan dari hutang agar perusahaan tumbuh lebih cepat dan sebaliknya. Dengan demikian, semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka diharapkan tingkat penghindaran pajaknya semakin tinggi. Hasil penelitian terdahulu dari

Budiman dan Setiyono (2012) dan Feranika (2016) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

D. Model Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep

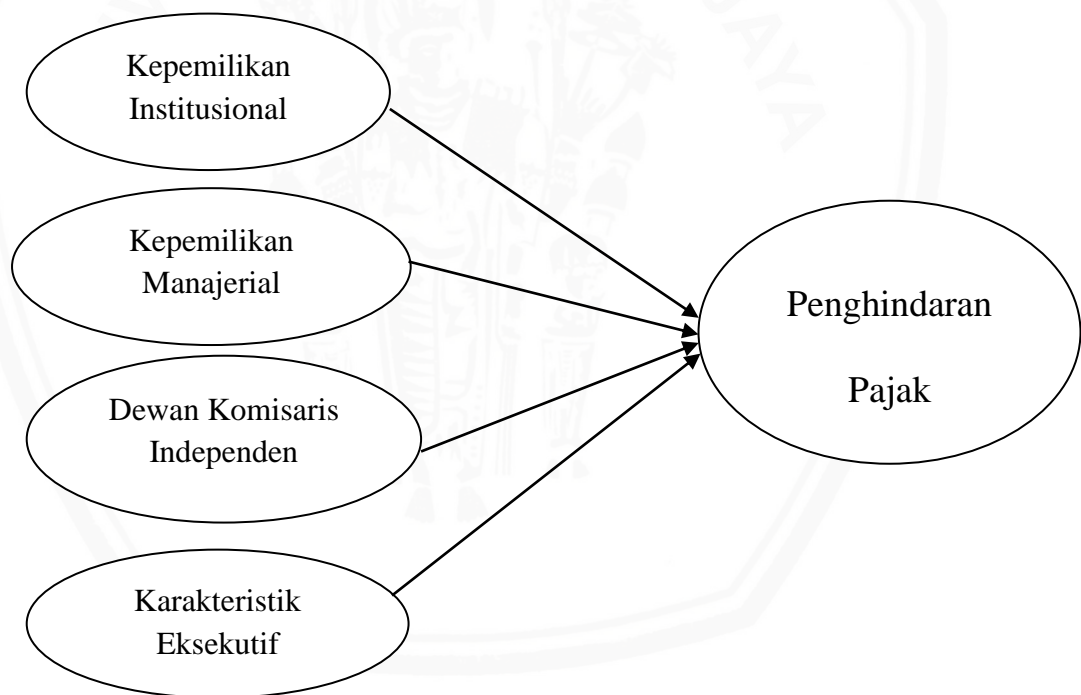
Dalam persaingan dunia bisnis, manajemen keuangan yang baik merupakan tuntutan bagi setiap perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak, agar laba perusahaan bertambah. Saat ini penghindaran pajak menjadi hal yang lumrah bagi sebagian Wajib Pajak. Dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah capaian penerimaan pajak pada tahun 2016 yang mengindikasikan adanya peningkatan praktik-praktik yang menimbulkan penerimaan pajak menjadi berkurang.

Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak yaitu dengan menerbitkan beberapa peraturan tentang *good corporate governance*. GCG ini diketahui dapat mengurangi potensi penghindaran pajak. Dimana setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Dengan adanya GCG, pemegang saham dapat memiliki keyakinan atas perusahaan yang diinvestasi.

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen yang merupakan indikator dari GCG ini dapat dijadikan tolak ukur tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan khususnya dalam

membayar pajak. Selain GCG, karakteristik eksekutif juga dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Karakteristik eksekutif sebagai sifat dari eksekutif turut menentukan bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk memperjelas alur pemikiran peneliti, maka dapat dilihat pada kerangka pemikiran pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Konsep
Sumber: Diolah peneliti, 2018

2. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada model hipotesis pada Gambar 2, yang memuat:

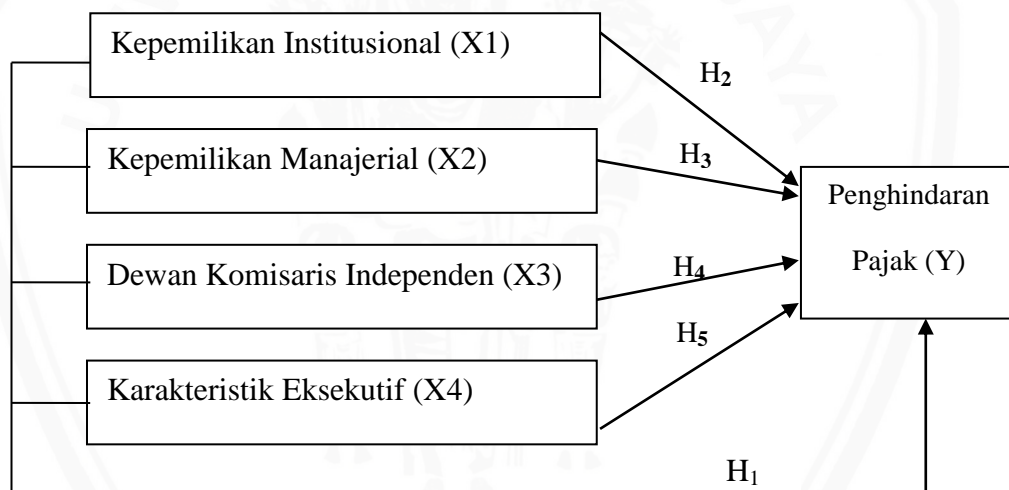
H₁ : Kepemilikan Institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak

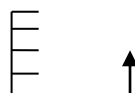
H₄ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₅ : Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak



Gambar 2. Model Hipotesis

Sumber: Diolah peneliti, 2018

 : Berpengaruh secara bersama-sama

 : Berpengaruh secara parsial

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksplanatori apabila didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif menurut Creswell (2014:5) merupakan metode-metode yang meneliti hubungan antarvariabel untuk menguji suatu teori. Sedangkan pendekatan eksplanatori menurut Zulganef (2008:11) merupakan penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antara variabel yang menunjukkan suatu fenomena tertentu. Penggunaan penelitian eksplanatori ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar variabel terkait faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen serta karakteristik eksekutif.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau di observasi (Creswell, 2014:76). Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen:

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang (mungkin) menyebabkan, memengaruhi atau mempunyai efek pada *outcome* (Creswell, 2014:77). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif.

a. Kepemilikan Institusional (KINS)

Kepemilikan institusional menurut Mahadewi dan Komang (2017) merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan karena kepemilikan sahamnya yang besar. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Sihaloho dan Pratomo (2015) mengemukakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional akan membuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dihindari. Perhitungan kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan rasio :

$$KINS = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Sumber: Feranika (2016)

b. Kepemilikan Manajerial (KMNJ)

Kepemilikan manjerial merupakan besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan. Mahulae et al (2016) mengungkapkan bahwa semakin besar saham dimiliki oleh manajerial

maka akan mengurangi perilaku manajemen yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio :

$$KMNJ = \frac{\text{Total saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Sumber: Mahulae et. al (2016)

c. Dewan Komisaris Independen (DKIN)

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI.

Bursa Efek Indonesia saat ini mempunyai aturan bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa. Dalam penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) menyatakan bahwa apabila proporsi dewan komisaris independen semakin besar maka tindakan penghindaran pajak akan semakin kecil. Dewan komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio :

$$DKIN = \frac{\text{Total dewankomisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

Sumber: Pilos (2017)

d. Karakteristik Eksekutif (KAE)

Eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam perusahaan dan atau suatu organisasi. Eksekutif memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan *risk averse* yang cenderung kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Sihaloho dan Pratomo (2015) menyatakan bahwa apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan.

Karakteristik eksekutif dapat diketahui dengan menggunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan (Paligrova, 2010). *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan. Semakin besar deviasi *earning* perusahaan maka mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Paligrova (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2012) mengukur risiko perusahaan dengan menghitung deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Adapun rumus yang dimaksud yaitu:

$$KAE = \sqrt{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2 / (T - 1)}$$

Sumber: Budiman dan Setiyono (2012)

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan *risk taker* atau *risk averse* kah eksekutif dalam perusahaan. Semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut merupakan *risk taker* dan sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse* (Budiman dan Setiyono, 2012).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat yang disebabkan oleh variabel independen atau bebas (Sinambela, 2014:48). Terdapat ringkasan 12 variasi pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak oleh Hanlon dan Heitman (2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merujuk penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et. al (2005). Penelitian lain yang turut menggunakan pengukuran ini yaitu Budiman dan Setiyono (2012), Musyarrofah (2017), Feranika (2016). Penggunaan pengukuran CETR ini dilakukan dengan pertimbangan banyaknya penelitian terbaru mengenai penghindaran pajak yang turut menggunakan pengukuran ini. Selain itu data yang digunakan untuk pengukuran menggunakan CETR mudah didapatkan melalui laporan keuangan perusahaan. *Cash ETR* diukur dengan membandingkan jumlah kas yang dibayar perusahaan untuk pajak pada tahun berjalan dengan laba sebelum pajak penghasilan pada tahun berjalan (Dyreng et. al, 2005).

Semakin tinggi CETR mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, CETR yang rendah mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak. Rumus pengukuran CETR adalah:

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre\ tax\ income}$$

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Keterangan:

Cash tax paid = jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan pada tahun berjalan untuk membayar pajak pada tahun berjalan.

Pre tax income = laba sebelum pajak pada tahun berjalan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu data gabungan dari *time series* dan *cross section*. Hal ini dilakukan karena pengamatan tidak cukup jika diamati hanya pada waktu bersamaan saja dan perlu ditentukan pengamatan pada beberapa periode waktu (Astuti, 2010).

2. Sumber Data

Sumber data menggunakan data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain atau informasi yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan tahunan perusahaan sektor jasa properti yang berakhir 31 Desember

pada tahun 2011 – 2016 yang dipublikasi dalam *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* resmi perusahaan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sinambela (2014) merupakan obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif terhadap keputusan perusahaan jasa properti dalam melakukan tindakan penghindaran pajak selama tahun 2011 – 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 49 perusahaan properti.

Perusahaan ini dipilih dikarenakan sektor tersebut sedang menjadi sasaran Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak Properti biasanya menggunakan perhitungan PPh final dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan yang nominalnya cenderung lebih kecil dibandingkan nilai pada akte jual beli. Padahal ketentuannya

yaitu penggunaan NJOP atau nilai akte jual beli tergantung nilai mana yang paling besar (nasional.kontan.co.id). Maka dari itu perusahaan properti sedang diawasi secara ketat karena memiliki potensi tinggi dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel harus dapat memberikan gambaran yang benar dari populasi (Sinambela, 2014:95). Dalam menetapkan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kriteria penetapan sampel yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan properti yang menerbitkan laporan keuangan serta laporan tahunan selama tahun 2011 – 2016
- b. Perusahaan properti memiliki data mengenai variabel-variabel yang digunakan yaitu kepemilikan institusional (X_1) yang terdiri dari total saham perusahaan yang dimiliki insitusi serta total saham perusahaan yang beredar, kepemilikan manajerial (X_2) yang terdiri dari total saham perusahaan yang dimiliki manajerial serta total saham perusahaan yang beredar, dewan komisaris independen (X_3) yang terdiri dari total dewan komisaris independen serta total dewan komisaris, karakteristik eksekutif (X_4) yang terdiri dari laba sebelum pajak serta total aset perusahaan, dan penghindaran pajak

yang terdiri dari arus kas pembayaran pajak perusahaan serta laba sebelum pajak.

c. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2011-2016

Berikut merupakan ringkasan proses seleksi sampel perusahaan jasa properti selama tahun 2011-2016 yang disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ringkasan *Sampling* Perusahaan Sektor Properti Tahun 2011-2016

No	Nama Perusahaan	Kode Perusa haan	Kriteria			Sam pel
			1	2	3	
1	PT. Armidian Karyatama Tbk	ARMY	-	✓	-	-
2	Agung Podomoro Land Tbk	APLN	✓	✓	✓	✓
3	Alam Sutera Realty Tbk	ASRI	✓	-	✓	-
4	Bekasi Asri Pemula Tbk	BAPA	✓	-	✓	-
5	Bumi Citra Permai Tbk	BCIP	✓	-	✓	-
6	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST	✓	✓	✓	✓
7	PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk	BIKA	✓	-	✓	-
8	Bhunawatala Indah Permai Tbk	BIPP	✓	✓	-	-
9	Bukti Darmo Property Tbk	BKDP	✓	✓	-	-
10	Sentul City Tbk	BKSL	✓	-	✓	-
11	PT. Bumi Serpong Damai Tbk	BSDE	✓	-	✓	-
12	Cowell Development Tbk	COWL	✓	-	✓	-
13	Ciputra Development Tbk	CTRA	✓	✓	✓	✓
14	Duta Anggada Realty Tbk	DART	✓	-	✓	-
15	Intiland Development Tbk	DILD	✓	✓	✓	✓
16	PT. Puradelta Lestari Tbk	DMAS	✓	-	✓	-
17	Duta Pertiwi Tbk	DUTY	✓	-	✓	-
18	Bakrieland Development Tbk	ELTY	-	-	-	-
19	Megapolitan Developments Tbk	EMDE	✓	-	✓	-
20	PT. Forza Land Indonesia Tbk	FORZ	-	-	-	-
21	Fortune Mate Indonesia Tbk	FMII	✓	-	✓	-
22	Gading Development Tbk	GAMA	✓	-	✓	-
23	Gowa Makassar Tourism Development Tbk	GMTD	✓	-	✓	-
24	Perdana Gapura Prima Tbk	GPRA	✓	-	✓	-
25	PT. Greenwood Sejahtera Tbk	GWSA	✓	-	✓	-
26	Jaya Real Property Tbk	JRPT	✓	-	✓	-

Lanjutan Tabel 3.1

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Kriteria			Sampel
			1	2	3	
27	Kawasan Industri Jababeka Tbk	KIJA	✓	-	✓	-
28	PT. Lamicitra Nusantara Tbk	LAMI	-	-	-	-
29	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	LCGP	-	-	-	-
30	Lippo Cikarang Tbk	LPCK	✓	-	✓	-
31	Lippo Karawaci Tbk	LPKR	✓	-	✓	-
32	Modernland Realty Ltd Tbk	MDLN	✓	-	✓	-
33	Metropolitan Kentjana Tbk	MKPI	-	-	-	-
34	PT. Mega Manunggal Property Tbk	MMLP	-	-	-	-
35	Metropolitan Land Tbk.	MTLA	✓	✓	✓	✓
36	Metro Realty Tbk	MTSM	✓	-	✓	-
37	Nirvana Development Tbk	NIRO	✓	-	✓	-
38	Indonesia Prima Property Tbk	OMRE	✓	-	✓	-
39	PT. PP Properti Tbk	PPRO	-	-	-	-
40	Plaza Indonesia Realty Tbk	PLIN	✓	-	✓	-
41	Pudjiati Prestige Tbk	PUDP	✓	✓	✓	✓
42	Pakowon Jati Tbk	PWON	✓	✓	✓	✓
43	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	RBMS	✓	✓	-	-
44	Roda Vivatex Tbk	RDTX	✓	-	✓	-
45	Pikko Land Developmennt Tbk	RODA	✓	-	✓	-
46	Danayasa Arthatama Tbk	SCBD	✓	✓	✓	✓
47	Suryamas Dutamakmur Tbk	SMDM	✓	-	✓	-
48	PT. Summarecon Agung Tbk	SMRA	✓	✓	✓	✓
49	PT. Sitara Propertindo Tbk	TARA	✓	-	✓	-
Total						9

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Tabel 3.2 Penetapan Pemilihan Sampel per Kriteria

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan properti yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2016	49
2.	Perusahaan properti yang tidak menerbitkan laporan keuangan serta laporan tahunan secara lengkap pada tahun 2011-2016	(7)
3.	Perusahaan tidak memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan	(29)
4.	Mengalami kerugian dalam laporan keuangan tahun 2011-2016	(3)

Lanjutan Tabel 3.2

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
5.	Perusahaan yang baru <i>listing</i> pada periode yang diteliti serta <i>delisting</i> selama periode yang diteliti	(1)
6.	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	9
7.	Jumlah observasi 9 (perusahaan) x 6 (2011-2016)	54

Sumber: Diolah peneliti, 2018

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan jasa properti yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016. Selain itu data juga diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial (Sugiyono, 2015:147). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif dan uji statistik inferensial yang di dalamnya memuat uji asumsi klasik serta analisis linier regresi berganda.

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Menurut Sinambela (2014:189), statistik ini

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Uji Statistik Inferensial

Statistik inferensial menurut Suryani dan Hendriyadi (2016:220) merupakan penelitian sampel dimana peneliti ingin menaksir parameter populasi melalui data sampel. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2015:148). Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013:277), untuk menganalisis sebuah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diperlukan uji prasyarat analisis agar data tersebut layak dianalisis. Uji prasyarat analisis atau yang disebut sebagai uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Langkah awal yang harus dilakukan adalah *screening* terhadap data yang akan diolah. Hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Jika variabel tidak terdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) dimana menggunakan nilai

p-value dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila *p-value* $> 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2016:31).

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonieritas juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Penelitian ini menggunakan pengujian dengan nilai *tolerance* dan VIF, dimana jika nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas di antara variabel bebas (Priyatno, 2016:131).

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas. Namun apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016 : 134).

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear. Jika terdapat korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. Berikut merupakan tolak ukur pengambilan keputusan Durbin Watson yang dijelaskan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pengambilan Keputusan Durbin Watson

Jika	Hipotesis nol	Keputusan
$0 < d < dl$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tolak
$dl \leq d \leq du$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak ada keputusan
$4 - dl < d < 4$	Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak
$4 - du \leq d \leq 4 - dl$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak ada keputusan
$du < d < 4 - du$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima

Sumber: Ghozali (2016:108)

Selain itu penelitian ini juga menggunakan uji Runs Test untuk melihat kepastian ada tidaknya gejala autokorelasi karena uji Durbin Watson mempunyai daerah dimana tidak ada kepastian ada tidaknya gejala autokorelasi sehingga membutuhkan tambahan uji autokorelasi lainnya.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yaitu regresi linier yang mana variabel dependennya dihubungkan dengan jumlah variabel independen yang lebih

dari satu. Adanya penambahan variabel independen ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan (Misbahuddin dan Hasan, 2013:88). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{CETR} = a + b\text{KINS} + b\text{KMNJ} + b\text{DKIN} + b\text{KAE} + e$$

Keterangan ;

CETR	= pengukuran penghindaran pajak, digambarkan dengan tingginya nilai CETR maka penghindaran pajak semakin rendah
a	= Konstanta
KINS	= Kepemilikan Institusional
KMNJ	= Kepemilikan Manajerial
DKIN	= Dewan Komisaris Independen
KAE	= Karakteristik Eksekutif
b 1,...,4	= Koefisien regresi
e	= <i>Error</i>

G. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis lebih lanjut sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi merupakan pengukuran seberapa jauh kemampuan model regresi dapat menerangkan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nilai

koefisien determinasi menunjukkan ragam naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Semakin dekat nilai R^2 ke nilai satu, maka semakin tepat/cocok garis regresi untuk meramalkan Y (Sugiarto, 1992:80-81). Penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²* atau nilai R^2 yang disesuaikan yang biasa digunakan untuk penelitian yang menggunakan 3 atau lebih variabel independen. Nilai *Adjusted R²* dapat naik dan turun apabila ada tambahan variabel independen di dalam model (Ghozali, 2016:95).

2. Uji Statistik F

Uji Statistik F atau uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan memengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan besaran nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig. > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Siregar, 2014:402).

3. Uji Statistik t

Uji parsial atau *t test* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya dengan membandingkan besaran nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $Sig. < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ atau $Sig. > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Priyatno, 2016:66).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan pertama kali pada tahun 1912 di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian mengalami kevakuman selama Perang Dunia I yaitu tahun 1914 – 1918. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. PT. BEI yang sebelumnya bernama PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) merupakan hasil merger dengan Bursa Efek Surabaya. PT. BEJ memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melalui SK nomor 323/KMK.01.01/1992 tanggal 18 Maret 1992 dan beroperasi secara resmi sebagai bursa swasta pada 13 Juli 1992 setelah mendapat penyerahan pengelolaan bursa dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selaku pengelola sebelumnya. PT. BEI berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara bursa yang bertugas untuk memfasilitasi perdagangan efek di Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 7 menyebutkan bahwa Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam rangka mencapai

tujuan-tujuan tersebut, Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek. Selain itu, Bursa Efek juga wajib menetapkan beberapa peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.

Beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini dipilih dengan teknik pengambilan sampel berupa metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel didasarkan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk memberikan informasi secara optimal. Sampel dalam penelitian ini diambil terbatas pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengeluarkan laporan tahunan serta keuangan tahun 2011-2016. Adapun daftar perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yaitu:

Tabel 4.1 Daftar Nama Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Sampel

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1.	Agung Podomoro Land Tbk	APLN
2.	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST
3.	Ciputra Development Tbk	CTRA
4.	Danayasa Arthatama Tbk	SCBD
5.	Intiland Development Tbk	DILD
6.	Metropolitan Land Tbk.	MTLA
7.	Pakowon Jati Tbk	PWON
8.	Pudjiati Prestige Tbk	PUDP
9.	PT. Summarecon Agung Tbk	SMRA

Sumber: Diolah peneliti, 2018

B. Penyajian Data

1. Kepemilikan Institusional (KINS)

Kepemilikan institusional (KINS) dihitung dengan membagi saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar saham perusahaan dimiliki oleh

institusi. Berikut adalah data KINS perusahaan sampel penelitian periode 2011-2016:

Tabel 4.2 Data Kepemilikan Institusional (KINS) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Kepemilikan Institusional						Rata-rata
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Agung Podomoro Land Tbk	APLN	0,67	0,67	0,67	0,67	0,77	0,77	0,70
2.	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST	1,00	0,75	0,61	0,58	0,58	0,58	0,68
3.	Ciputra Development Tbk	CTRA	0,39	0,38	0,39	0,38	0,44	0,46	0,41
4.	Danayasa Arthatama Tbk	SCBD	0,50	0,42	0,42	0,43	0,43	0,42	0,44
5.	Intiland Development Tbk	DILD	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,84	0,88
6.	Metropolitan Land Tbk.	MTLA	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
7.	Pakowon Jati Tbk	PWON	0,85	0,70	0,52	0,58	0,52	0,56	0,62
8.	Pudjiati Prestige Tbk	PUDP	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
9.	PT. Summarecon Agung Tbk	SMRA	0,38	0,42	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39
Rata-rata			0,68	0,63	0,59	0,59	0,60	0,60	0,6154
Tertinggi			1,00	0,89	0,89	0,89	0,89	0,84	0,90
Tertinggi dari tahun 2011 - 2016			1,00						
Terendah			0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Terendah dari tahun 2011 - 2016			0,38						

Sumber: Diolah peneliti (2018)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui proporsi saham yang dimiliki institusi oleh perusahaan sampel penelitian tahun 2011-2016. Rata-rata kepemilikan institusional adalah 0,6154. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan properti dimiliki oleh institusi sebesar 61,54%. Tabel 4.2 juga

menunjukkan bahwa jumlah rata-rata kepemilikan institusional mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun 2011 sebesar 0,68 kemudian tahun 2012 sebesar 0,63 kemudian tahun 2013 dan 2014 turun menjadi 0,59 dan tahun 2015 serta 2016 naik kembali menjadi 0,60. Nilai tertinggi keseluruhan terjadi pada Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dengan nilai 1,00 sedangkan nilai terendah keseluruhan terjadi pada PT. Summarecon Agung Tbk sebesar 0,38.

2. Kepemilikan Manajerial (KMNJ)

Kepemilikan manajerial (KMNJ) dihitung dengan membagi saham yang dimiliki oleh manajer dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar saham perusahaan dimiliki oleh manajer. Berikut adalah data KMNJ perusahaan sampel penelitian periode 2011-2016:

Tabel 4.3 Data Kepemilikan Manajerial (KMNJ) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Agung Podomoro Land Tbk	APLN	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ciputra Development Tbk	CTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Danayasa Arthatama Tbk	SCBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Intiland Development Tbk	DILD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
6.	Metropolitan Land Tbk.	MTLA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
7.	Pakowon Jati Tbk	PWON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pudjiati Prestige Tbk	PUDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lanjutan Tabel 4.3

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9.	PT. Summarecon Agung Tbk	SMRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rata-rata Keseluruhan			0,0095					
Tertinggi			0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Tertinggi dari tahun 2011 - 2016			0,05					
Terendah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terendah dari tahun 2011 - 2016			0,00					

Sumber: Diolah peneliti (2018)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui proporsi saham yang dimiliki manajer oleh perusahaan sampel penelitian tahun 2011-2016. Rata-rata sampel perusahaan properti yaitu 0,0095. Diketahui bahwa rata-rata saham yang dimiliki manajer dalam perusahaan adalah sebesar 0,95% dari total saham yang beredar. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajer memiliki saham yang kecil dan kurang dari 1/10 (10%) bagian dari jumlah seluruh saham untuk memperoleh hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Nilai kepemilikan manajerial tertinggi dari tahun 2011 hingga tahun 2016 terjadi pada Metropolitan Land Tbk sebesar 0,05 atau 5% untuk tahun 2011 hingga tahun 2014 dan sebesar 0,04 atau 4 % untuk tahun 2015 dan tahun 2016. Nilai terendah tahun 2011 hingga 2016 terjadi pada Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, Ciputra Development Tbk, Danayasa Arthatama Tbk, Pakowon Jati Tbk, Pudjiati Prestige Tbk dan PT. Summarecon Agung Tbk sebesar 0,00 atau 0%. Intiland Development Tbk juga memiliki nilai terendah

yang sama yaitu 0,00 atau 0% yang terjadi pada tahun 2011 hingga 2014 serta 2016.

3. Dewan Komisaris Independen (DKIN)

Dewan komisaris independen dihitung dengan membandingkan jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris.

Berikut adalah data DKIN perusahaan sampel penelitian periode 2011-2016:

Tabel 4.4 Data Dewan Komisaris Independen (DKIN) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Agung Podomoro Land Tbk	APLN	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50
2.	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST	0,33	0,33	0,33	0,40	0,40	0,40
3.	Ciputra Development Tbk	CTRA	0,50	0,40	0,50	0,50	0,33	0,33
4.	Danayasa Arthatama Tbk	SCBD	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
5.	Intiland Development Tbk	DILD	0,33	0,33	0,33	0,33	0,40	0,40
6.	Metropolitan Land Tbk.	MTLA	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
7.	Pakowon Jati Tbk	PWON	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
8.	Pudjiati Prestige Tbk	PUDP	0,33	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
9.	PT. Summarecon Agung Tbk	SMRA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Rata-rata			0,41	0,42	0,42	0,42	0,41	0,43
Rata-rata Keseluruhan			0,4165					
Tertinggi			0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Tertinggi dari tahun 2011 - 2016			0,67					
Terendah			0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Terendah dari tahun 2011 - 2016			0,33					

Sumber: Diolah peneliti (2018)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa rata-rata dewan komisaris independen yaitu 0,4165. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan properti rata-rata telah memiliki proporsi komisaris independen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A PT Bursa Efek Jakarta mengenai jumlah minimal komisaris independen yaitu sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris.

Apabila dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata proporsi dewan komisaris independen berfluktuasi atau naik turun, mulai dari tahun 2011 sebesar 0,41 kemudian tahun 2012 hingga tahun 2014 naik menjadi 0,42 kemudian tahun 2015 turun menjadi 0,41 dan tahun 2016 naik menjadi 0,43. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan proporsi dewan komisaris independen. Nilai tertinggi secara konstan terjadi pada Pakowon Jati Tbk di tahun 2012 hingga tahun 2016 sebesar 0,67 atau 67%. Nilai terendah terjadi pada beberapa perusahaan seperti Agung Podomoro Land Tbk pada tahun 2011-2015, Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk pada tahun 2011-2013, Ciputra Development Tbk pada tahun 2015-2016, Danayasa Arthatama Tbk pada tahun 2011-2016, Intiland Development Tbk pada tahun 2011-2014, Metropolitan Land Tbk pada tahun 2011-2016 secara konstan sebesar 0,33 atau 33%.

4. Karakteristik Eksekutif (KAE)

Karakteristik eksekutif diukur dengan melihat risiko perusahaan yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) dan

membaginya dengan total aset perusahaan. Berikut adalah data KAE perusahaan sampel penelitian periode 2011-2016:

Tabel 4.5 Data Karakteristik Eksekutif (KAE) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Agung Podomoro Land Tbk	APLN	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST	0,15	0,11	0,07	0,07	0,05	0,05
3.	Ciputra Development Tbk	CTRA	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
4.	Intiland Development Tbk	DILD	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
5.	Metropolitan Land Tbk.	MTLA	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
6.	Pudjiati Prestige Tbk	PUDP	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Pakowon Jati Tbk	PWON	0,14	0,11	0,09	0,05	0,04	0,04
8.	Danayasa Arthatama Tbk	SCBD	0,20	0,20	0,13	0,13	0,13	0,12
9.	PT. Summarecon Agung Tbk	SMRA	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
Rata-rata			0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03
Rata-rata Keseluruhan			0,0484					
Tertinggi			0,20	0,20	0,13	0,13	0,13	0,12
Tertinggi dari tahun 2011 - 2016			0,20					
Terendah			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Terendah dari tahun 2011 - 2016			0,01					

Sumber: Diolah peneliti (2018)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa rata-rata karakteristik eksekutif adalah 0,0484. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksekutif yang bersifat *risk averse* atau kurang berani dalam mengambil risiko berjumlah 33 data observasi ($<0,0484$) dan yang bersifat *risk taker* berjumlah 21 dari 54 observasi ($>0,0484$). Terdapat penurunan rata-rata nilai karakteristik eksekutif untuk setiap tahun yaitu tahun 2011 sebesar 0,08 menjadi sebesar 0,06 tahun 2012, kemudian tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 0,04, tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,03. Nilai tertinggi keseluruhan terjadi pada Danayasa Arthatama Tbk, yaitu tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 0,20. Nilai terendah keseluruhan terjadi pada Agung Podomoro Land Tbk dan Pudjiati Prestige Tbk sebesar 0,01 dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

5. Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* atau CETR dimana diukur dengan membandingkan jumlah kas yang dibayar perusahaan untuk pajak pada tahun berjalan dengan laba sebelum pajak penghasilan pada tahun berjalan. Berikut adalah data CETR perusahaan sampel penelitian periode 2011-2016:

Tabel 4.6 Data Penghindaran Pajak (CETR) pada Sampel Perusahaan Properti Periode 2011-2016

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Agung Podomoro Land Tbk	APLN	0,23	0,25	0,30	0,30	0,02	0,01
2.	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST	0,28	0,08	0,08	0,14	0,12	0,09

Lanjutan Tabel 4.6

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Ciputra Development Tbk	CTRA	0,34	0,24	0,10	0,15	0,20	0,20
4.	Intiland Development Tbk	DILD	0,42	0,27	0,28	0,20	0,29	0,43
5.	Metropolitan Land Tbk.	MTLA	0,15	0,13	0,16	0,15	0,01	0,00
6.	Pudjiati Prestige Tbk	PUDP	0,57	0,13	0,10	1,44	0,12	0,13
7.	Pakowon Jati Tbk	PWON	0,22	0,19	0,17	0,09	0,02	0,02
8.	Danayasa Arthatama Tbk	SCBD	0,39	0,40	0,08	0,48	0,63	0,51
9.	PT. Summarecon Agung Tbk	SMRA	0,42	0,31	0,20	0,13	0,17	0,34
Rata-rata			0,34	0,22	0,16	0,34	0,18	0,19
Rata-rata Keseluruhan			0,2385					
Tertinggi			0,57	0,40	0,30	1,44	0,63	0,51
Tertinggi dari tahun 2011 - 2016			0,57					
Terendah			0,15	0,08	0,08	0,09	0,01	0,00
Terendah dari tahun 2011 - 2016			0,00					

Sumber: Diolah peneliti (2018)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rata-rata *cash ETR* adalah 0,2385. Nilai tertinggi keseluruhan yaitu 0,57 terjadi pada Pudjiati Prestige Tbk. sedangkan nilai terendahnya yaitu sebesar 0,00 terjadi pada Metropolitan Land Tbk. Rata-rata sampel perusahaan properti per tahunnya mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun 2011 sebesar 0,34 kemudian turun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,22 lalu tahun 2013 menjadi 0,16, kemudian tahun 2014 naik menjadi 0,34 lalu tahun 2015 turun menjadi 0,18 dan tahun 2016 naik menjadi 0,19. Hal

tersebut menunjukkan bahwa tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016 penghindaran pajak sedang marak terjadi penghindaran pajak mengingat semakin rendah nilai *cash ETR* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

C. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan untuk mengetahui gambaran secara ringkas terhadap data yang digunakan dalam variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu kepemilikan institusional (KINS), kepemilikan manajerial (KMNJ), dewan komisaris independen (DKIN) dan karakteristik eksekutif (KAE), sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak (CETR). Hasil pengujian statistik deskriptif yang diolah menggunakan SPSS versi 23 disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Sampel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KINS	54	,38	1,00	,6154	,18415
KMNJ	54	,00	,05	,0095	,01614
DKIN	54	,33	,67	,4165	,11025
KAE	54	,01	,20	,0484	,04992
CETR	54	,00	1,44	,2385	,22229
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data primer yang diolah melalui SPSS 23, 2018

Hasil analisis deksriptif tersebut menginformasikan bahwa *Cash ETR* (CETR) maksimum perusahaan sektor properti tahun 2011 sampai 2016 yang terdaftar di BEI adalah 1,44 sedangkan nilai minimumnya adalah 0,00. Nilai

mean (rata-rata) CETR adalah sebesar 0,2385 atau 23,85% dengan deviasi standar sebesar 0,22229 atau 22,229%. Hal ini berarti CETR perusahaan sektor properti yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2016 memusat di kisaran angka 23,85 dengan penyimpangan sebesar 22,23.

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional minimum perusahaan sektor properti tahun 2011 sampai 2016 yang terdaftar di BEI adalah sebesar 0,38 yang artinya sebesar 38% sahamnya dimiliki institusi dan nilai maksimal sebesar 1,00 yang artinya 100% sahamnya dimiliki oleh institusi. Nilai *mean* sebesar 0,6154 dengan standar deviasi sebesar 0,18415 yang berarti bahwa kepemilikan institusional perusahaan sektor properti yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2016 memusat di kisaran angka 61,54 dengan penyimpangan sebesar 18,42. Kesimpulan yang dapat diambil dari observasi yang dilakukan yaitu terdapat 61,54% kepemilikan saham perusahaan sampel dimiliki oleh institusi sedangkan sisanya dimiliki oleh manajerial dan publik.

Kepemilikan manajerial berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai minimum kepemilikan manajerial perusahaan sektor properti tahun 2011 sampai 2016 yang terdaftar di BEI adalah sebesar 0,00 yang artinya sahamnya tidak dimiliki manajerial dan nilai maksimal sebesar 0,05 yang artinya 5% sahamnya dimiliki oleh manajerial. Nilai *mean* sebesar 0,0095 dengan standar deviasi sebesar 0,01614 yang berarti bahwa 0,95% kepemilikan saham perusahaan sampel dimiliki oleh manajerial sedangkan sisanya dimiliki oleh institusi dan publik.

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai minimum dewan komisaris independen perusahaan sektor properti tahun 2011 sampai 2016 yang terdaftar di BEI sebesar 0,33 yang artinya 33% dari jumlah dewan komisaris adalah komisaris independen dan nilai maksimal sebesar 0,67 yang artinya 67% dari jumlah dewan komisaris adalah komisaris independen. Nilai *mean* sebesar 0,4167 dengan standar deviasi sebesar 0,11003 yang berarti bahwa 41,67% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris adalah komisaris independen. Perusahaan yang dijadikan sampel telah memenuhi peraturan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta untuk mempunyai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dewan komisaris independen dari jajaran anggota dewan komisaris.

Karakteristik eksekutif dalam Tabel 4.7 menginformasikan bahwa nilai *mean* karakteristik eksekutif perusahaan sektor properti tahun 2011 sampai 2016 yang terdaftar di BEI sebesar 0,0484 dengan standar deviasi sebesar 0,04992 yang berarti bahwa rata-rata eksekutif perusahaan sampel berani mengambil risiko perusahaan sebesar 4,84%. Nilai minimum karakteristik eksekutif sebesar 0,01 yang artinya eksekutif mengambil risiko perusahaan sebesar 1%. Hal tersebut berarti eksekutif perusahaan tersebut memiliki sifat *risk averse* atau cenderung tidak mengambil risiko. Nilai maksimal sebesar 0,20 yang artinya eksekutif mengambil risiko perusahaan sebesar 20% atau jauh di atas rata-rata perusahaan. Hal tersebut berarti eksekutif perusahaan tersebut memiliki sifat *risk taker* atau cenderung berani dalam mengambil

risiko. Karakter eksekutif yang lebih berani dalam membuat keputusan tidak ragu-ragu dalam melakukan pembiayaan dari hutang.

2. Uji Statistik Inferensial

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residualnya memiliki distribusi yang normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016:154). Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dasar pengujiannya yaitu apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Nilai Sig.	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	,003 ^c	Berdistribusi tidak normal

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Nilai Asymp. Sig. untuk nilai residual variabel nilainya adalah sebesar 0,003, jauh di bawah $\alpha = 0,05$ yang berarti nilai residual pada data variabel penelitian tidak terdistribusi secara normal. Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal (Ghozali, 2016:34). Sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang tersedia. Setelah mengetahui bentuk grafik histogram, barulah diketahui bentuk

transformasi data yang tepat. Berikut merupakan tabel bentuk transformasi yang dapat dilakukan sesuai dengan grafik histogram yang disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Bentuk Transformasi Data

Bentuk Grafik Histogram	Bentuk Transformasi
Moderate positive skewness	SQRT(x) atau akar kuadrat
Substansial positive skewness	LG10(x) atau logaritma 10 atau LN
Severe positive skewness dengan bentuk L	1/x atau inverse
Moderate negative skewness	SQRT (k-x)
Substansial negative skewness	LG10(k-x)
Severe negative skewness dengan bentuk J	1/(k-x)

Sumber: Ghozali (2016:34)

Data yang tidak terdistribusi secara normal dalam penelitian ini dilakukan transformasi menggunakan SQRT(x) atau akar kuadrat karena bentuk grafik histogram seluruh variabel merupakan bentuk *moderate positive skewness*. Adanya pencilan dideteksi dengan menggunakan konversi nilai data ke dalam skor standardized atau z-score. Dari nilai z-score, apabila diperoleh nilai ≥ 2.5 maka dinyatakan outlier (Ghozali, 2016:41). Dalam penelitian ini, terdapat tiga 3 observasi yang outlier yaitu dari variabel karakteristik eksekutif Danayasa Arthatama Tbk pada tahun 2011 dan 2012 serta variabel penghindaran pajak Pudjiati Prestige Tbk pada tahun 2014, sehingga satu set pengamatan (tahun 2012 hingga 2016) dari Danayasa Arthatama Tbk dan Pudjiati Prestige Tbk dihilangkan/dihapus. Selanjutnya dilakukan analisis regresi dengan menggunakan 42 pengamatan (7 perusahaan selama 6 tahun). Hasil penelitian dengan menggunakan 42 pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Nilai Sig.	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	,059 ^c	Berdistribusi normal

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,059 yang berarti lebih besar ($>$) dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada data tersebut telah berdistribusi normal.

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:104). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu dengan membandingkan nilai *tolerance* yang didapat dari regresi berganda. Jika nilai *tolerance* $>$ 0.10 atau sama dengan nilai VIF $<$ 10 maka dapat dipastikan model regresi yang digunakan terbebas dari multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
KINS (X_1)	0,621	1,611	Tidak terjadi Multikolinearitas
KMNJ (X_2)	0,552	1,811	Tidak terjadi Multikolinearitas
DKIN (X_3)	0,699	1,430	Tidak terjadi Multikolinearitas
KAE (X_4)	0,469	2,134	Tidak terjadi Multikolinearitas

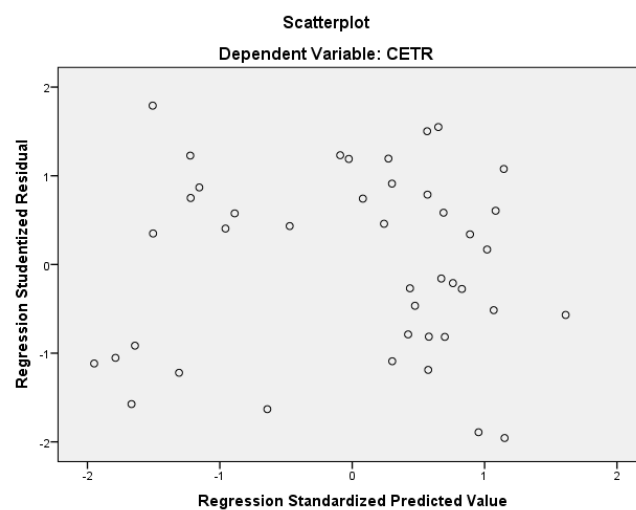
Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* lebih dari ($>$) 0,10 dan nilai VIF kurang dari ($<$) 10. Jadi dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3) Uji Heterokedastisitas

Penelitian ini dilakukan dengan melihat *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisisnya yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada Y maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016:134). Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah melalui SPSS 23, 2018

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, dapat diketahui bahwa titik-titik (*scatterplot*) menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu penyebaran titik-titik data juga tidak membentuk gelombang

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali atau tidak membentuk suatu pola yang jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear (Ghozali, 2016:107). Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. DW test ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson yang didapat dari regresi dengan nilai di tabel Durbin Watson (tingkat signifikansi 5%). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 3.2. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi

dl	4-dl	du	4-du	Dw	Interprestasi
1,3064	2,6936	1,7202	1,7234	1,406	Tidak ada keputusan

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan pengujian autokorelasi yang dilakukan, diketahui bahwa nilai pengujian Durbin-Watson adalah 1,406 yang berarti terletak di antara dl dan du ($dl < d < du$). Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat kepastian mengenai ada tidaknya gejala autokorelasi sehingga memerlukan uji autokorelasi lain. Uji yang dilakukan adalah uji Runs test dimana uji ini dilakukan untuk hasil uji autokorelasi yang tidak terdapat kepastian seperti halnya dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil dari uji Runs Test:

Tabel 4.13 Hasil Uji Runs Test

Runs Test	Nilai Sig.	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,160	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 4.13 maka dapat diketahui nilai Asymp. Sig. adalah 0,160 yang berarti lebih dari ($>$) 0,05 artinya tidak terdapat masalah autokorelasi.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel independen, yaitu Kepemilikan Institusional (X_1), Kepemilikan Manajerial (X_2), Dewan Komisaris Independen (X_3) dan Karakteristik Eksekutif (X_4) terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y).

1) Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan menggunakan bantuan *SPSS versi 23*. Model regresi yang didapatkan dapat dilihat di Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	1,477	0,243	6,088	0,000
KINS	-0,854	0,211	-4,039	0,000
KMNJ	0,550	0,497	1,106	0,276
DKIN	-0,942	0,282	-3,343	0,002
KAE	0,882	0,381	2,312	0,026

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 4.14, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 1,477 - 0,854\text{KINS} + 0,550\text{KMNJ} - 0,942\text{DKIN} + 0,882\text{KAE} + e$$

Keterangan:

CETR = Cash ETR (Penghindaran Pajak)

KINS	= Kepemilikan Institusional
KMNJ	= Kepemilikan Manajerial
DKIN	= Dewan Komisaris Independen
KAE	= Karakteristik Eksekutif

Persamaan regresi linier berganda pada tabel 4.14 menggunakan kolom *Unstandardized Coefficient Beta*. Interpretasi persamaan regresi tersebut yaitu:

a) $b = -0,854$

Cash ETR akan menurun sebesar 0,854 satuan untuk setiap tambahan satu satuan Kepemilikan Institusional (X_1). Jadi dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan, apabila terjadi peningkatan 1% Kepemilikan Institusional maka *Cash ETR* akan menurun sebesar 85,4%.

b) $b = 0,550$

Cash ETR akan meningkat sebesar 0,550 satuan untuk setiap tambahan satu satuan Kepemilikan Manajerial (X_2). Jadi dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan, apabila terjadi peningkatan 1% Kepemilikan Manajerial maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 55%.

c) $b = -0,942$

Cash ETR akan menurun sebesar 0,942 satuan untuk setiap tambahan satu satuan Dewan Komisaris Independen (X_3). Jadi dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan, apabila terjadi peningkatan 1% Proporsi Dewan Komisaris Independen maka *Cash ETR* akan menurun sebesar 94,2%.

d) $b = 0,882$

Cash ETR akan meningkat sebesar 0,882 satuan untuk setiap tambahan satu satuan Karakteristik Eksekutif (X_4). Jadi dengan asumsi variabel yang lainnya

dianggap konstan, apabila terjadi peningkatan 1% Karakteristik Eksekutif maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 88,2%.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam hal ini Penghindaran Pajak yang diukur dengan *Cash ETR*. Besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini diketahui dengan menggunakan nilai *Adjusted R²*. Nilai *Adjusted R²* dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Nilai *Adjusted R²* dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,607 ^a	,368	,300

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil *Adjusted R²* adalah sebesar 0,300 yang berarti pengaruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional (X_1), Kepemilikan Manajerial (X_2), Dewan Komisaris Independen (X_3) dan Karakteristik Eksekutif (X_4) secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y) adalah sebesar 30%. Sedangkan sisanya 70% akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 4.15 juga menunjukkan koefisien relasi yang menunjukkan besarnya hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Nilai R (koefisien korelasi) yaitu sebesar 0,607. Nilai ini

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen termasuk dalam kategori korelasi yang kuat karena berada pada selang 0,60 – 0,799 (Sugiyono, 2015:184).

b. Uji Statistik F

Uji Statistik F dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besaran F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig. > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Model	F_{hitung}	Sig.	F_{tabel}	Keterangan
1 Regression	5,393	,002 ^b	2,62	Signifikan

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 4.16, hasil tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,393 > 2,62$ atau nilai $Sig. F (0,002) < \alpha = 0,05$. Maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti bahwa H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional (X_1), Kepemilikan Manajerial (X_2), Dewan Komisaris Independen (X_3) dan Karakteristik Eksekutif (X_4) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak.

c. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional (X_1), Kepemilikan Manajerial (X_2), Dewan Komisaris Independen (X_3) dan Karakteristik Eksekutif

(X₄) secara parsial terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y).

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Variabel Independen	t _{hitung}	Sig.	t _{tabel}	Keterangan
KINS (X ₁)	-4,039	0,000	-2,026	Signifikan
KMNJ (X ₂)	1,106	0,276	2,026	Tidak Signifikan
DKIN (X ₃)	-3,343	0,002	-2,026	Signifikan
KAE (X ₄)	2,312	0,026	2,026	Signifikan

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Dari Tabel 4.17 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Hasil uji t antara Kepemilikan Institusional (X₁) dengan Penghindaran Pajak (Y) menunjukkan bahwa -t_{hitung} adalah -4,039 sedangkan -t_{tabel} sebesar -2,026 yang berarti -t_{hitung} < -t_{tabel} atau Sig. t (0,000) < α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H₂ diterima yang berarti Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
- 2) Hasil uji t antara Kepemilikan Manajerial (X₂) dengan Penghindaran Pajak (Y) menunjukkan bahwa t_{hitung} adalah sebesar 1,106 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,026 yang berarti t_{hitung} < t_{tabel} atau Sig. t (0,276) > α = 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H₃ ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- 3) Hasil uji t antara Dewan Komisaris Independen (X₃) dengan Penghindaran Pajak (Y) menunjukkan bahwa -t_{hitung} adalah -3,343 sedangkan -t_{tabel} sebesar -2,026 yang berarti -t_{hitung} < -t_{tabel} atau Sig. t (0,002) < α = 0,05. Hal

ini menunjukkan bahwa H_4 diterima yang berarti dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

- 4) Hasil uji t antara Karakteristik Eksekutif (X_4) dengan Penghindaran Pajak (Y) menunjukkan bahwa t_{hitung} adalah sebesar 2,312 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,026 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t (0,026) < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 diterima yang berarti karakteristik eksekutif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Eksekutif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak secara simultan dan parsial. Dapat diketahui pula bahwa dari ketiga variabel independen tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap *Cash ETR* adalah Karakteristik Eksekutif karena memiliki koefisien beta dan t hitung paling besar.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji statistik F maupun t yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keputusan hipotesis dapat dilihat di Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Keputusan Hipotesis

No.	Hipotesis	Keputusan
1.	H_1 : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Eksekutif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak	H_1 diterima

Lanjutan Tabel 4.18

No.	Hipotesis	Keputusan
2.	H ₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak	H ₂ diterima
3.	H ₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak	H ₃ ditolak
4.	H ₄ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak	H ₄ diterima
5.	H ₅ : Karakteristik Eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak	H ₅ diterima

Sumber: Diolah peneliti, 2018

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Eksekutif secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat dilihat dari F hitung sebesar 5,393 dan nilai signifikansinya sebesar 0,002 yang berarti kurang dari ($<$) 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham, adanya dewan komisaris independen serta karakteristik eksekutif dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang

diprosikan *Cash ETR*, yang dapat dilihat dari t_{hitung} -4,039 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 yang berarti kurang dari ($<$) 0,05 mengindikasikan bahwa H_2 diterima. Hal tersebut berarti semakin tinggi saham perusahaan dimiliki institusi maka akan membuat praktik penghindaran pajak semakin rendah.

Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi cenderung di atas 10% (lima persen) sehingga pihak institusi lebih merasa memiliki perusahaan yang menyebabkan pengawasan dan kontrol terhadap pihak manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan properti dimiliki oleh institusi sebesar 61,54%, yang berarti institusi yang memiliki saham mempunyai hak suara yang dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS atau hak suaranya dapat memberikan pengaruh. Seperti dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 144 baik direksi, dewan komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (10%) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara akan memiliki hak untuk mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Hak suara tersebut oleh institusi dapat digunakan sebagai tuntutan kepada manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham termasuk bertindak kehati-hatian mengenai penghindaran pajak agar kemakmuran pemegang saham dapat terjamin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho dan Pratomo (2015), Mahulae et. al (2016) dan Rahmawati et. al (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sihaloho dan Pratomo (2015) berpendapat bahwa semakin besar

kepemilikan institusional akan membuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dihindari. Rahmawati et al (2016) juga menyebutkan bahwa adanya proporsi kepemilikan saham oleh institusi yang lebih tinggi akan semakin mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan memonitor setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak, yang dapat dilihat dari t_{hitung} 1,106 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,276 yang berarti lebih dari ($>$) 0,05 mengindikasikan bahwa H_3 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa tinggi rendahnya variasi penghindaran pajak tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan manajerial. Artinya tinggi rendahnya saham yang dimiliki manajer tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Jumlah saham yang dimiliki manajer dalam perusahaan sampel cenderung rendah apabila dibandingkan dengan kepemilikan institusional. Persentase kepemilikan manajerial masih jauh di bawah rata-rata yang mana rata-ratanya yaitu sebesar 0,0095 dan perusahaan yang jumlah kepemilikan manajerialnya dibawah rata-rata yaitu sekitar 77,78% (42 dari 54 observasi). Dari tahun 2011 hingga 2016 Pudjiati Prestige Tbk dan Danayasa Arthatama Tbk nilai kepemilikan manajerialnya sebesar 0,0000 atau 0% yang berarti di bawah rata-rata.

Di sisi lain kepemilikan saham oleh manajer dengan kepemilikan $\geq 10\%$ merupakan kepemilikan saham yang signifikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 144, baik direksi, dewan komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $1/10$ (10%) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Hal tersebut yang menyebabkan kepemilikan manajerial, dalam penelitian ini, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jumlah kepemilikan saham yang kecil menyebabkan pihak manajemen tidak mempunyai hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan sebagai pemegang saham. Pihak manajemen memungkinkan untuk lebih mementingkan kepentingan dan tujuannya sendiri sebagai manajer dibandingkan kepentingan perusahaan dan tujuannya sebagai pemegang saham. Selain itu, jumlah kepemilikan saham yang kecil menyebabkan tidak adanya rasa memiliki perusahaan yang mengakibatkan pihak manajemen tidak berusaha optimal dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahulae et. al (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang

dapat dilihat dari t_{hitung} -3,343 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,002 yang berarti kurang dari ($<$) 0,05 mengindikasikan bahwa H_4 diterima. Artinya, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan dewan komisaris dalam perusahaan dijadikan sebagai pengawas jalannya usaha bagi pemegang saham.

Dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan memiliki peran menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan serta terlaksananya akuntabilitas. Keberadaan komisaris independen dapat menetralkan segala kebijakan yang dibuat oleh direksi serta dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan para pihak yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik. Hal tersebut menyebabkan manajemen atau pengelola perusahaan diawasi secara langsung oleh dewan komisaris independen yang membuat tindakan penghindaran pajak menjadi terbatas.

Peraturan BEJ mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam BEJ untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat. Peraturan tersebut telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan sampel penelitian dimana rata-rata jumlah dewan komisaris independen adalah 0,4167 atau 41,67% dari total dewan komisaris. Jumlah komisaris independen terendah

yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah 1 orang dari total 3 orang dewan komisaris atau 33,33% yang artinya perusahaan mematuhi peraturan BEJ tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dan Feranika (2016) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sandy dan Lukviarman (2015) berpendapat bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka akan semakin rendah *tax avoidance*.

5. Pengaruh Karakteristik Eksekutif secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang dapat dilihat dari t_{hitung} 2,312 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,026 yang berarti kurang dari ($<$) 0,05 mengindikasikan bahwa H_5 diterima. Hal tersebut berarti bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker* atau pengambil risiko maka penghindaran pajak akan semakin besar, sebaliknya semakin eksekutif bersifat *risk averse* maka penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Tingkat risiko perusahaan yang lebih tinggi mengindikasikan karakter eksekutif memiliki sifat *risk taker* dan tingkat risiko perusahaan yang lebih rendah mengindikasikan karakter eksekutif memiliki sifat *risk averse*. Dalam penelitian ini rata-rata karakteristik eksekutif adalah 0,0484. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksekutif yang bersifat *risk averse* atau kurang berani dalam mengambil risiko berjumlah 33 dari 54 observasi ($<$ 0,0484) dan yang bersifat

risk taker berjumlah 21 dari 54 observasi ($> 0,0484$). Eksekutif yang cenderung mengambil risiko, menghindari pajak lebih tinggi daripada eksekutif yang kurang berani mengambil risiko. Hal ini disebabkan penghindaran pajak hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berani mengambil risiko karena meskipun penghindaran pajak adalah legal namun itu bukan selera pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012), Sihaloho dan Pratomo (2015) dan Feranika (2016) yang menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Budiman dan Setiyono (2012), Sihaloho dan Pratomo (2015) dan Feranika (2016) berpendapat bahwa eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen serta karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2016. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 perusahaan dikarenakan 2 perusahaan merupakan data outlier. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya. berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut membuktikan bahwa keempat variabel tersebut mempengaruhi tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besarnya saham yang dimiliki institusi dalam perusahaan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham institusi dengan kecenderungan kepemilikan saham yang besar menyebabkan timbulnya rasa memiliki perusahaan. Adanya rasa

memiliki tersebut menyebabkan pemegang saham institusi memiliki rasa tanggung jawab terhadap perusahaan dan menuntut pengelola perusahaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Saham yang dimiliki manajer dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena rendahnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan sampel membuat manajer tidak memiliki hak yang cukup besar untuk memutuskan aktivitas penghindaran pajak perusahaan.
4. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka aktivitas penghindaran pajak akan semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan dewan komisaris independen merupakan perwakilan dari pemegang saham untuk mengawasi aktivitas dari pengelola perusahaan termasuk penghindaran pajak.
5. Karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi risiko perusahaan yang diambil eksekutif maka akan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Eksekutif yang berani mengambil risiko perusahaan cenderung menghindari pajak lebih tinggi dibandingkan dengan eksekutif yang kurang berani dalam mengambil risiko perusahaan.

B. Saran

Peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Menambah variabel penelitian lain yang dapat menjelaskan penghindaran pajak karena hasil uji statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa 70% penghindaran pajak dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI agar dapat melihat variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak pada masing-masing perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Penggunaan variabel selain kepemilikan manajerial karena tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel kepemilikan manajerial namun dengan tambahan syarat pemilihan sampel yaitu perusahaan sampel harus memiliki kepemilikan manajerial minimal 10%.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bastian, Indra. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Creswell, John. 2014. *Research Design* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Davies, Adrian. 2006. *Best Practice in Corporate Governance: Building Reputation and Sustainable Success*. USA: Gower Publishing Company
- Djanegara, Moermahadi. 2008. Menuju *Good Corporate Governance: Suatu Kajian Empiris*. Bogor: Kesatuan Press
- Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- McSweeney, Edward. 1985. Memanajementi Eksekutif. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Misbahuddin dan Iqbal Hassan. 2013. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara
- OECD. 2004. OECD Principles of Corporate Governance. France: OECD Publication Services
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Priyatno, Duwi. 2016. Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media
- Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba Empat
- Sinambela, Lijan. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solomon, J. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. 2nd ed. The Atrium, West Sussex: John Willey and Sons, Ltd
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiarto. 1992. *Tahap Awal + Aplikasi Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*. Jakarta: Kencana
- Suryani dan Hendryadi. 2016. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal:

- Ahmad, Afridian Wirahadi dan Yossi Septriani. 2008. Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol 3 No. 2 ISSN 1858-3687 hal 47-55
- Astuti, Alfira Mulya. 2010. *Fixed Effect Model* pada Regresi Data Panel. *Institut Agama Islam Negeri Mataram* Vol. 3 No. 2 Hal. 134 - 145
- Bovi, Maurizio. 2005. Book-Tax-Gap, An Income Horse Race. *ISAE Working Paper* No. 61
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 25-28 September 2012
- Desai, Mihir A dan Dhammika Dharmapala. 2006. Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*. Vol. 79 Issue 1, 145-179
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, and Edward L. Maydew. 2005. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*.

- _____. 2010. "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189
- Feranika, Ayu. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi* Issue Vol 4 No 1
- Hanlon, Michelle. 2005. The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences. *The Accounting Review*. Vol. 80 Pages. 137-166
- _____ and Heitzman, Shane. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics* 50, 127-178
- Jensen, M. 1986. Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. *American Economic Review* 76, 323-329
- _____ and William H Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360
- Lev, Baruch dan Doron, Nissim. 2004. Taxable Income, Future Earnings, and Equity Values. *The Accounting Review*. Pp 1039-1074.
- Low, Angie. 2006. Managerial Risk-Taking Behaviour and Equity-Based Compensation, *Fisher College of Business Working Paper* No. 2006-03-003
- Lukviarman, N. 2006. Etika bisnis tidak berjalan di Indonesia: Ada apa dalam *Corporate Governance?*. *Jurnal Siasat Bisnis* 9 (2): 139-156
- Mahadewi, A. A. Istri Sri dan Komang Ayu Krisnadewi. 2017. Pengaruh kepemilikan manajerial, institusional dan proporsi dewan komisaris independen pada manajemen laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN 2302-8556 Vol 18.1 Januari 2017
- Mahulae, E. Endari, Dudi P, dan Annisa Nurbaiti. 2016. Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap *tax avoidance*. *e-Proceeding of Management*: Vol. 3 No. 2 ISSN: 2355-9357 Page 1626-1633
- Murni, Eka dan Eneng. 2016. The Role of Institutional Ownership, Board of Independent Commissioner and Leverage: Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management* ISSN: 2319-7668. Volume 18, Issue 11. Ver 1 PP 79-85
- Musyarrofah, Eva. 2017. Pengaruh kepemilikan manajerial, leverage, dan size terhadap cash effective tax rate. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. ISSN : 2460-0585 Volume 6 Nomor 9

- Paligorova, Teodora. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure, *Bank of Canada Working Paper*, 2010-3
- Pilos, Nina Van Der. 2017. Tax Avoidance and Corporate Governance: Does the board of directors influence tax avoidance?. *Erasmus University: Erasmus School of Economics Spec. Accounting and Auditing*
- Pohan, Hotman T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* Vol. 4, No. 2, Juli 2009, Hal. 113-135
- Rahmawati, Maria dan Rosalita. 2016. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Perpajakan* Vol. 10 No. 1
- Sandy, S. dan Niki Lukviarman. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI* Volume 19 No. 2, Desember 2015. 85-98
- Shliefer, A., dan Vishney, R. 1986. Large Shareholders and Corporate Control.. *Journal of Political Economy*. Vol. 94, Pages 461-488
- Sihaloho, Sefnia Lora dan Dudi Pratomo. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*. *e-Proceeding of Management*: Vol. 2 No. 3 ISSN: 2355-9357 Page 3417-3425
- Wibawa, Agung, Wilopo dan Yusrilah. 2016. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan* Vol. 11 No. 1

Publikasi Online:

- Darussalam dan Danny Septriadi,. 2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. Diakses pada 25 November 2017 melalui [http://www.ortax.org/.....](http://www.ortax.org/)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Laporan Kinerja DJP 2016. Jakarta: Dipublikasi online .Diakses pada 25 November 2017 melalui www.pajak.go.id.
- Hamzah, Zaky Al. 2013. Potensi Pajak Sektor Properti Besar. Diakses pada 2 Januari 2018 melalui [http://nasional.republika.co.id/.....](http://nasional.republika.co.id/)

- Hidayat, Anwar. 2014. Tutorial independen T test dengan SPSS. Diakses pada 29 Maret 2018 melalui [https://www.statistikian.com/.....](https://www.statistikian.com/)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Perekonomian Indonesia dan APBN 2017. Diakses pada 25 November 2017 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta: KNKG
- Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
- Republik Indonesia. 1995. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- _____. 2007. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- _____. 2009. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Setyowati, Desy. 2017. Ditjen Pajak: Kontribusi 100 Wajib Pajak Besar Sektor Properti Anjlok. Diakses pada 30 Desember 2017 melalui [https://katadata.co.id/.....](https://katadata.co.id/)
- Zatnika, MA dan Anna Suci. 2013. Pemeriksaan Perusahaan Properti Serentak di Juli. Diakses pada 2 Januari 2018 melalui [http://nasional.kontan.co.id/.....](http://nasional.kontan.co.id/)
- www.idx.co.id
- www.sahamok.com/emiten/sektor-property-real-estate/sub-sektor-property-realestate/
- www.kbbi.web.id/eksekutif